

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENGUATAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
BERWAWASAN KEBANGSAAN GUNA MENINGKATKAN DAYA
SAING BANGSA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

Oleh:

ANANG PUDJIJANTO, S.IK, M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 69060422

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGARAN (PPRA) LXII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“PENGUATAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERWAWASAN KEBANGSAAN GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”**

Penentuan Judul dan Tutor Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021, tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXII Tahun 2021 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI Tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.IP dan Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Sebagai produk manusia biasa, Penulis menyadari bahwa Taskap ini pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang

membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih.

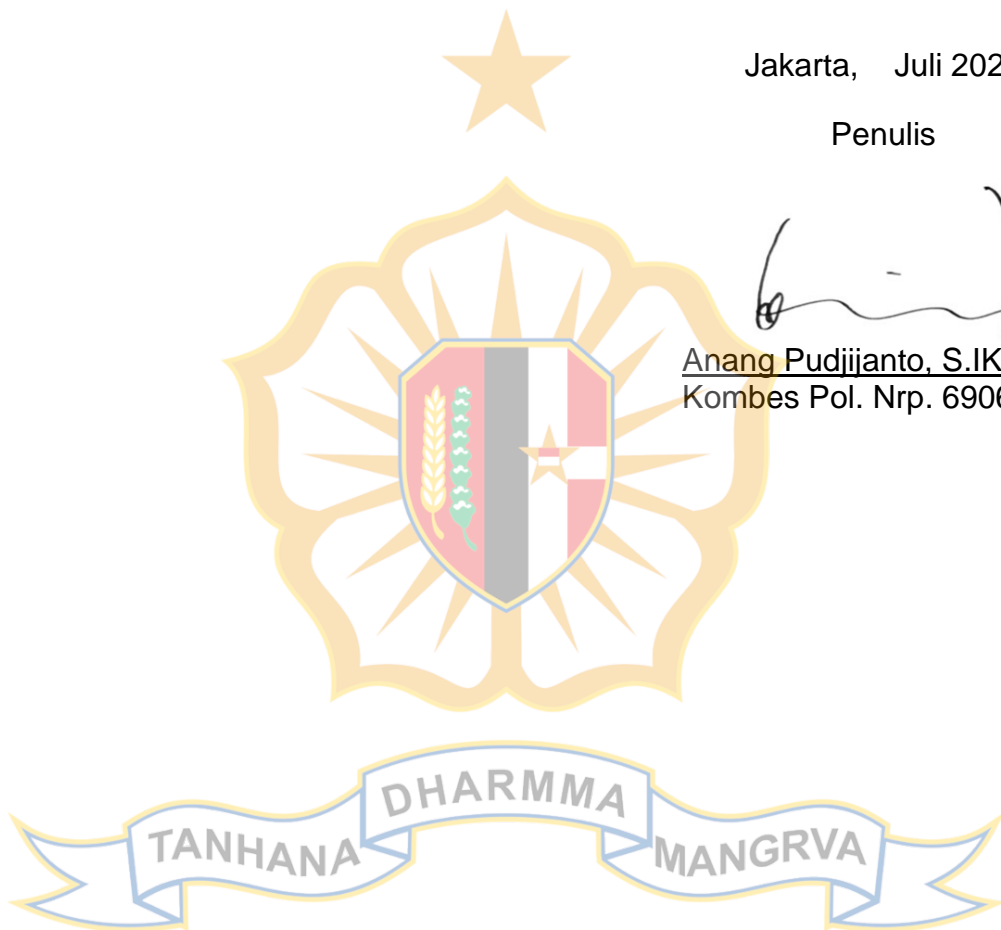
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2021

Penulis



Anang Pudjijanto, S.IK, M.Si
Kombes Pol. Nrp. 69060422



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anang Pudjijanto, S.I.K., M.Si
Pangkat : Komisaris Besar Polisi
Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bid. Watpers SSDM
Polri
Instansi : Mabes Polri
Alamat : Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.



Penulis Taskap



Anang Pudjijanto, S.I.K., M.Si
Komisaris Besar Pol. Nrp. 69060422

DAFTAR ISI

**PENGUATAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERWAWASAN
KEBANGSAAN GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DI ERA
REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

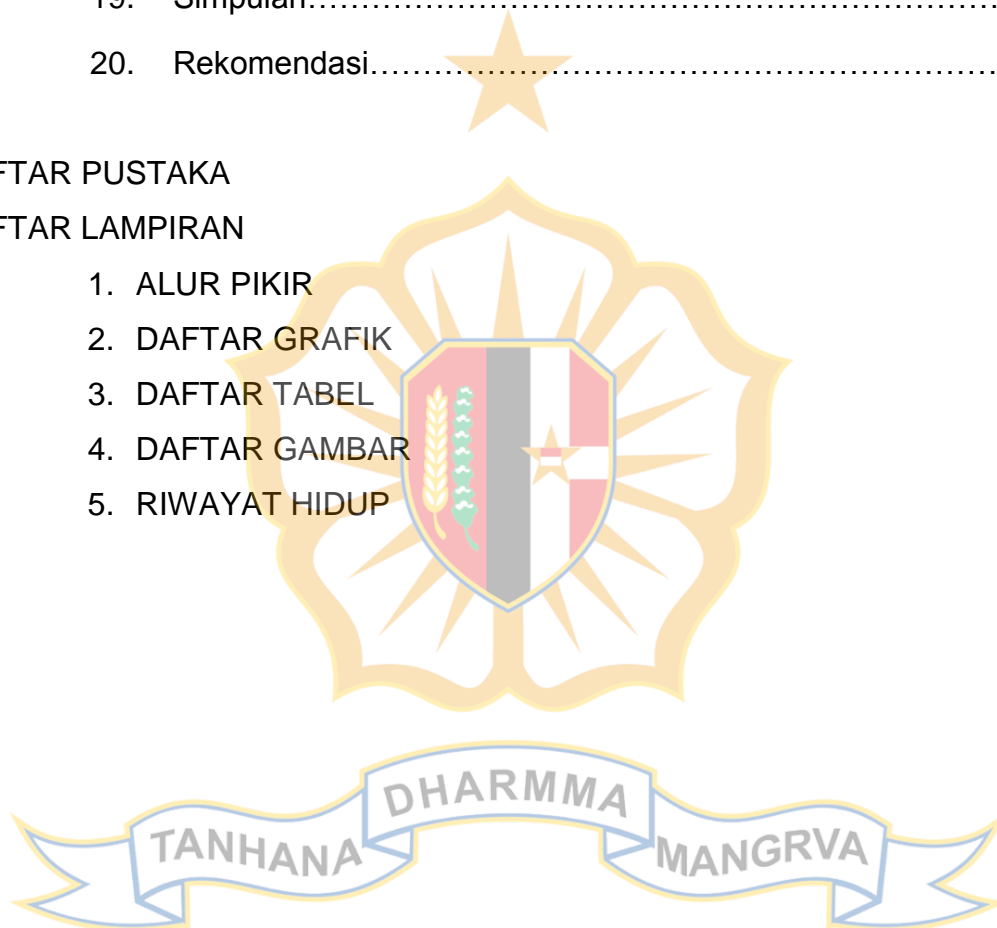
| | Halaman |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR GRAFIK | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang..... | 1 |
| 2. Rumusan Masalah..... | 4 |
| 3. Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| 4. Ruang Lingkup dan Sistematika..... | 5 |
| 5. Metode Penelitian..... | 6 |
| 6. Pengertian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 7. Umum..... | 9 |
| 8. Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan dan Regulasi..... | 9 |
| 9. Kerangka Teoritis | 10 |
| 10. Data Fakta | 13 |
| 11. Lingkungan Strategis | 17 |
| 12. Peluang dan Kendala | 21 |
| BAB III PEMBAHASAN | 23 |
| 13. Umum..... | 23 |
| 14. Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia | 23 |
| 15. Penguatan Pembangunan Kesehatan Untuk Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia | 34 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 16. | Penguatan Pembangunan Pendidikan Untuk Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia Berwawasan Kebangsaan. | 42 |
| 17. | Penguatan Pembangunan IPTEK Guna Penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia | 53 |
| 18. | Hubungan antara Pembangunan SDM dan Daya Saing Bangsa di Era Revolusi Industri 4.0. | 58 |
| BAB IV | PENUTUP | 61 |
| 19. | Simpulan..... | 61 |
| 20. | Rekomendasi..... | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR GRAFIK
3. DAFTAR TABEL
4. DAFTAR GAMBAR
5. RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 1. Rasio Puskesmas Per Kecamatan Di Indonesia Tahun 2019
2. Grafik 2. Jumlah Klinik Pratama Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2019
3. Grafik 3. Jumlah Klinik Utama Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2019
4. Grafik 4. Jumlah Klinik Utama Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2019
5. Grafik 5. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2019
6. Grafik 6. Indeks Cakupan Layanan UHC Indonesia tahun 2018
7. Grafik 7. Rasio Anggaran Kesehatan Terhadap APBN Tahun 2016 – 2020
8. Grafik 8. Tren Belanja K/L Anggaran Kesehatan APBN Tahun 2016 – 2020
9. Grafik 9. Anggaran Kesehatan Menurut Fungsi Layanan Tahun 2019 dan Belanja Sektor Publik Menurut Fungsi Layanan 2010 – 2017
10. Grafik 10. Rasio Anggaran Kesehatan Terhadap APBD Tahun 2017



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Angka Pasrtisipasi Sekolah Tahun 2020 Berdasarkan Kelompok Umur



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Peta Angka Patisipasi Sekolah Usia 7018 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2020
2. Gambar 2 Peta Sebaran Guru Di Indonesia Tahun Ajaran 2019/ 2020
3. Gambar 3. Arah Kebijakan Pendidikan Karakter
4. Gambar 4. Ilustrasi Program Merdeka Belajar



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia sebagai sumber daya merupakan titik sentral sebagai pemikir, perencanaan, perekayasa, perancang dan pelaksana atau penyelenggara pembangunan suatu bangsa. Sumber daya manusia menjadi modal penting bagi suatu bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya. Tujuan nasional bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan tujuan nasional tersebut, manusia merupakan subyek dan obyek pembangunan bangsa Indonesia. Manusia menjadi pelaku sekaligus tujuan dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Peran strategis sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa menuntut suatu negara untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Era revolusi industri 4.0 dimana terjadi konektivitas di segala hal (*Internet of Thing*) serta perubahan yang cepat di era globalisasi menjadikan dunia semakin kompetitif. Globalisasi menjadikan setiap negara masuk ke dalam kompetisi liberalisasi dengan tingkat kemampuan dan daya saing yang berbeda¹, sehingga suatu negara dapat menjadi *trendsetter* atau *follower* sesuai dengan *competitiveness advantages* yang dimiliki. Kondisi tersebut memberikan konsekuensi logis yaitu perlunya suatu bangsa meningkatkan kualifikasi dan kualitas sumber daya manusianya secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing bangsa agar tetap bertahan dan unggul di kancah persaingan global apalagi di era revolusi industri 4.0 dimana 75% pekerjaan melibatkan kemampuan sains, teknologi, teknis dan matematika, *internet of things* serta pembelajaran sepanjang hayat.

Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa, tetapi capaiannya di tingkat global masih rendah dan harus banyak mengejar ketertinggalan. Pada tahun 2020, indeks modal

¹ Mada Sutapa. 2011. "Daya Saing Organisasi (Bangsa) Dalam Strategi Globalisasi", Jurnal Manajemen Pendidikan. No. 1 Tahun VII. Hal. 1- 8.

manusia atau Human Capital Index (HCI) Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Dunia berada di peringkat 87 dari 174 negara dengan skor 0,54². Skor 0,54 artinya anak Indonesia yang lahir pada saat ini untuk 18 tahun yang akan datang hanya dapat mencapai 54 % dari potensi produktivitas maksimumnya³. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) Indonesia versi *United Nations Development Programme* (UNDP) berada di peringkat 111 dari 189 negara⁴. Daya saing Indonesia berdasarkan penilaian *International Institute for Management Development* (IMD) *World Competitiveness Yearbook* (WCY) pada tahun 2020 berada di peringkat 40 dimana sebelumnya berada di peringkat 32. Pada bidang pendidikan, *Programme for International Student Assessment* (PISA) Indonesia tahun 2018 masih dibawah nilai- rata- rata yang ditetapkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD)⁵.

Masih rendahnya capaian pembangunan sumber daya manusia dan daya saing bangsa Indonesia tidak terlepas dari permasalahan di bidang kesehatan, pendidikan, serta penguasaan iptek. Di bidang kesehatan, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, *stunting* balita, penyakit, pola hidup masyarakat, akses air minum dan sanitasi layak serta ketimpangan sarana prasarana dan SDM kesehatan. Capaian indeks kesehatan global Indonesia pada tahun 2017 berada di peringkat 101 dari 149 negara⁶, dengan indeks perkembangan anak tahun 2020 berada di peringkat 117 dari 180 negara⁷. Di bidang pendidikan, Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan anak tidak sekolah (ATS), partisipasi pendidikan rendah,

² Sinar Harapan.2020.” Jangan Puas Indeks HCI Naik, Kita Masih Jauh Tertinggal”. https://www.sinarharapan.co/kesra/read/23533/jangan_puas_indeks_hci_naik_kita_masih_jauh_tertinggal diakses pada 22 Maret 2021.

³ Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.2019.“Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia”. Disampaikan pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2019.

⁴ Sinar Harapan. Op.Cit.

⁵ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. "Isu- Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJMN 2020 – 2024". disampaikan dalam Konsultasi Pusat RPJMN 2020-2014 di Jakarta tanggal 24 Juli 2019.

⁶ Yantina Debora. 2017. "Indeks Kesehatan Indonesia Masih Sangat Rendah". <https://tirto.id/cBRn> diakses pada 12 Mei 2021.

⁷ Tim CNN Indonesia. 2020. "Kesehatan Anak Indonesia Peringkat 117 di Dunia". <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200219120306-284-476063/kesehatan-anak-indonesia-peringkat-117-di-duniav> diakses pada 12 Mei 2021.

kesenjangan kualitas, sarana prasarana pendidikan dan pengajar. *Education index* Indonesia pada tahun 2017 berada di peringkat ke tujuh di Asean dengan skor 0,622⁸. Pada penguasaan iptek, Indonesia masih dihadapkan pada riset yang rendah, keterbatasan SDM riset dan inovasi yang belum menjawab kebutuhan industri. Pandemi covid-19 yang melanda dunia saat ini juga menambah kompleksitas permasalahan di berbagai aspek kehidupan manusia termasuk didalamnya pendidikan dan kesehatan.

Permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan iptek tersebut erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagai gambaran, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 9,41 %⁹. Walaupun terus menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi secara kuantitas terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk apalagi dengan adanya pandemi covid-19. Kemiskinan menyebabkan penduduk sulit untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sehingga penguasaan akan iptek rendah dan kesejahteraan masyarakat berjalan ditempat. Intervensi negara menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Hal tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat (2) berisi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Pendidikan yang disertai dengan kesehatan menjadi sarana akselerasi vertikal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Kompleksitas permasalahan pembangunan SDM Indonesia membutuhkan upaya penguatan agar SDM Indonesia semakin berkualitas dan berdampak pada peningkatan daya saing bangsa. Menjadi SDM yang berkualitas merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang. Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dalam mengembangkan pribadinya, memperoleh pendidikan dan mencerdaskan dirinya. Bukan hanya sumber daya manusia yang berkualitas secara intelektual, tetapi sumber daya

⁸ Scholastica Gerintya. 2019. “Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah”. <https://tirto.id/dnvR> diakses pada 12 Mei 2021.

⁹ Kementerian PPN.2019.”Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 – 2024”. Jakarta : Kementerian PPN

manusia yang berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan akan membentuk karakter sumber daya manusia Indonesia yang nasionalis dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang mampu mengoptimalkan peluang dan meminimalkan dampak negatif revolusi industri 4.0 seperti *disruptive technology*. Dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan kebangsaan diharapkan akan menghasilkan *output* berupa manusia Indonesia yang semakin berkualitas, unggul dan berkarakter sehingga akan meningkatkan daya saing bangsa dan mengantarkan Indonesia untuk mencapai tujuan nasional bangsa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok bahasan dalam kajian ini meliputi faktor penyebab rendahnya kualitas SDM Indonesia, upaya penguatan pembangunan kesehatan, pendidikan, iptek dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berwawasan kebangsaan guna meningkatkan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penguatan pembangunan sumber daya manusia diperlukan bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah *bagaimana memperkuat pembangunan sumber daya manusia berwawasan kebangsaan guna meningkatkan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0.*

Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan kajian yang akan dijawab dalam taskap ini adalah :

- a. Bagaimana kualitas SDM Indonesia yang berdampak pada daya saing SDM?
- b. Bagaimana penguatan pembangunan kesehatan mampu memperkuat pembangunan sumber daya manusia guna meningkatkan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0?
- c. Bagaimana penguatan pembangunan pendidikan mampu memperkuat pembangunan sumber daya manusia berwawasan kebangsaan guna meningkatkan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0?

- d. Bagaimana penguatan pembangunan iptek mampu memperkuat pembangunan sumber daya manusia guna meningkatkan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia berwawasan kebangsaan guna meningkatkan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0.

b. Tujuan

Taskap ini dibuat dengan tujuan memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran berdasarkan fakta-fakta yang ada kepada pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia berwawasan kebangsaan dan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas pada taskap ini meliputi :

- 1) Penguatan pembangunan sumber daya manusia berwawasan kebangsaan dibatasi pada penguatan pembangunan sumber daya manusia berwawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- 2) Penguatan pembangunan sumber daya manusia berwawasan kebangsaan guna meningkatkan daya saing di era revolusi industri 4.0 difokuskan pada pembahasan terkait dengan pendidikan, kesehatan dan inovasi iptek.

b. Sistematika

- 1) Bab I – Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menggambarkan secara singkat bagaimana kondisi sumber daya manusia dan daya saing bangsa yang dikaitkan dengan revolusi industri 4.0, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian.

- 2) Bab II – Tinjauan Pustaka, meliputi rujukan- rujukan dan landasan teori yang dijadikan sebagai kerangka analisis, terdiri dari peraturan perundangan- undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, serta lingkungan strategis yang berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia berwawasan kebangsaan, daya saing bangsa dan revolusi industri 4.0.
- 3) Bab III – Pembahasan, merupakan pembahasan dari pokok – pokok bahasan yang dianalisa dan hasil analisisnya meliputi kualitas SDM Indonesia, penguatan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan inovasi iptek dalam kerangka pembangunan SDM berwawasan kebangsaan guna meningkatkan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0 .
- 4) Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam taskap ini ialah metode analisis deskriptif dengan menekankan studi literatur dan data – data pendukung terkait topik bahasan. Teori pelayanan kesehatan masyarakat, *Total Quality Management* (TQM)/ Manajemen Peningkatan Mutu (MPM), inovasi, *human capital* dan daya saing digunakan sebagai kerangka teori dalam menganalisa data untuk menghasilkan strategi terbaik dalam penguatan pembangunan SDM berwawasan kebangsaan guna meningkatkan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0.

b. Pendekatan

Taskap ini menggunakan pendekatan empiris yang komprehensif yang didukung data dan fakta dalam melalui studi kepustakaan dengan analisis data sesuai kerangka teori dan dasar- dasar regulasi yang digunakan serta memperhatikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis.

6. Pengertian

Persamaan persepsi dalam membaca hasil penelitian merupakan hal yang penting, sehingga maksud peneliti dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengguna dari hasil penelitian. Penjelasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam taskap ini, sebagai berikut :

a. Penguatan

Penguatan berasal dari kata dasar kuat yang artinya mampu dan kuasa untuk berbuat sesuatu. Penguatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses atau cara atau perbuatan menguatkan atau menguatkan¹⁰. Sehingga penguatan dapat diartikan sebagai cara untuk menjadikan sesuatu agar semakin mampu untuk berbuat sesuatu.

b. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.¹¹

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

A.A. Mangkunegara mengartikan SDM sebagai seluruh kemampuan atau potensi penduduk di suatu wilayah tertentu beserta karakteristik demografis, sosial, dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan¹².

d. Wawasan Kebangsaan

Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹³.

e. Daya Saing

¹⁰ KBBI Online. 2021. "Kuat". <https://kbbi.web.id/kuat> diakses pada 18 Mei 2021.

¹¹ -, , "Pengertian Pembangunan", <http://repository.uin-suska.ac.id/4378/3/BAB%202.pdf> diakses pada 22 Maret 2021.

¹² A.A. Mangkunegara. 2001. "Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan". Bandung: PT Remaja Rosda Karya. hal. 56

¹³ Tim Pokja Wawasan Nusantara. 2021. "Bidang Studi Wawasan Nusantara". Jakarta : Lemhannas.

Porter mendefinisikan daya saing nasional (*national competitiveness*) sebagai sebuah kemampuan sebuah bangsa untuk berinovasi demi mencapai, atau memelihara, sebuah posisi menguntungkan (*advantageous position*) atas bangsa lain dalam sejumlah sektor industri kunci¹⁴.

f. Revolusi Industri 4.0

Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis, dimana terdapat perubahan cara hidup kerja manusia secara fundamental¹⁵.



¹⁴ Wilson Rajagukguk.2016. "Daya Saing (Competitiveness) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Negara: Studi Kasus Negara Berkembang". Proceeding Maranata Economics & Business Conference 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha

¹⁵ Hamdan. 2018. "Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi". Jurnal Nusamba Vol. 3 No.2 Oktober. Hal. 1 S.D 8.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan sangat menentukan daya saing SDM dan bangsa. Bukan hanya SDM yang berkualitas secara intelektual tetapi juga SDM yang memiliki wawasan kebangsaan sehingga timbul rasa nasionalisme dalam membangun bangsa dan negara. SDM yang berkualitas dengan penguasaan iptek menjadi modal penting dalam bersaing di era revolusi industri 4.0. Dalam bab ini akan dibahas tinjauan pustaka tentang penguatan SDM berwawasan kebangsaan guna meningkatkan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan dan regulasi, kerangka teoritis, data umum terkait SDM dan daya saing, dan lingkungan strategis berkaitan dengan pembangunan SDM dan daya saing.

8. Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan dan Regulasi

Dalam rangka pembangunan SDM berwawasan kebangsaan guna meningkatkan daya saing bangsa, Pemerintah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan, kebijakan dan regulasi. Peraturan-undangan, kebijakan dan regulasi tersebut adalah :

- a. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang ini mengatur tentang pembangunan kesehatan di Indonesia yang bertujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

- c. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

- d. UU No 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-undang ini bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi serta meningkatkan kemandirian , daya saing dan daya tarik bangsa di level internasional.

- e. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Kesehatan Nasional. Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif.

- f. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010 – 2025.

Pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

9. Kerangka Teoritis

- a. **Teori Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

Pelayanan kesehatan masyarakat oleh Hodgetts dan Casio didefinisikan sebagai pelayanan kesehatan yang ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi dengan tujuan memelihara, meningkatkan kesehatan dan mencegah masyarakat dari suatu penyakit¹⁶. Persyaratan pokok dari pelayanan kesehatan masyarakat adalah tersedia dan berkesinambungan (*available & continuous*), Dapat diterima dan wajar (*acceptable & appropriate*), Mudah dijangkau (*affordable*), Bermutu (*quality*)¹⁷.

b. Teori *Total Quality Management* (TQM) / Manajemen Peningkatan Mutu (MPM)

MPM oleh Edward Sallis didefinisikan sebagai filosofi perbaikan berkelanjutan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan disaat ini dan dimasa yang akan datang¹⁸. Terdapat 7 prinsip dalam MPM yang dapat diadopsi dalam penguatan pembangunan pendidikan di Indonesia, yaitu : (1) Tanggung jawab untuk manajemen puncak (*Top Management*); (2) Mutu difokuskan kepada konsumen dan evaluasi berbasis konsumen; (3) Design proses produksi dan metode kerja jelas untuk mencapai kesesuaian mutu produk (*conformance quality product*); (4) Setiap lembaga/ divisi bertanggung jawab atas tercapainya mutu produk yang baik.; (5) Mutu tidak boleh dinilai setelah menjadi barang jadi, tetapi sejak awal (sejak menjadi komponen); (6) Organisasi harus berusaha keras (*strive*) melaksanakan perbaikan mutu produk secara terus-menerus; (7) Perusahaan/lembaga harus bekerjasama untuk melaksanakan MPM.

c. Teori Inovasi

Inovasi menurut Dana dkk didefinisikan sebagai proses dimana pengetahuan ditransformasikan ke dalam produk dan atau jasa baik baru ataupun modifikasi secara signifikan sehingga meningkatkan

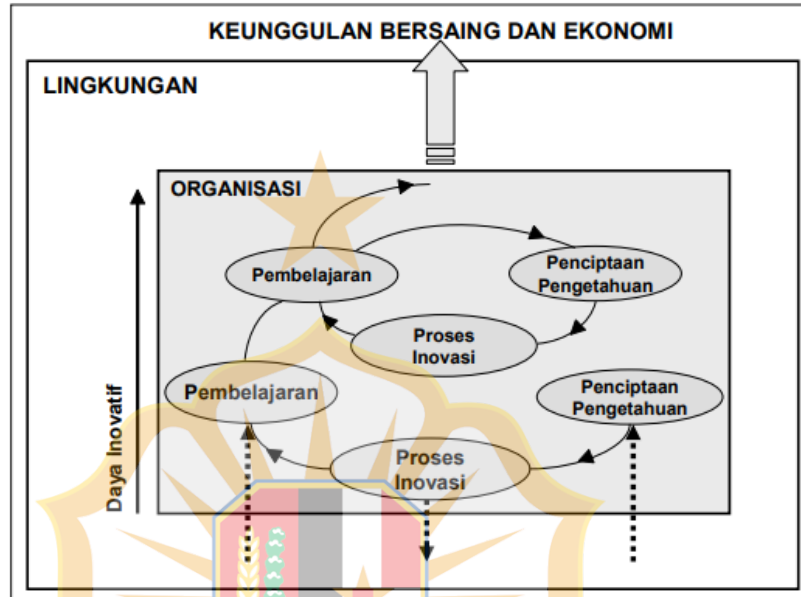
¹⁶ Azwar, Azrul. 1994. "Pengantar Administrasi Kesehatan". Tangerang : Binarupa Aksara. Hal. 43.

¹⁷ Ibid. Hal. 45.

¹⁸ Edward Sallis diterjemahkan oleh Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi. 2015. "Total Quality Management in Education. Terjemahan". Yogyakarta : IRCiSoD. Hlm. 62

keunggulan bersaing¹⁹. Inovasi memiliki hubungan erat dengan pembelajaran dan penciptaan pengetahuan. Hubungan tersebut digambarkan dalam model spiral oleh Mireille Merx dan Nijhof²⁰, sebagai berikut :

Gambar 1. Teori Inovasi Model Spiral



Sumber : Mireille Merx, C. and W.J. Nijhof. 2005

d. Teori *Human Capital*

Human Capital menurut Frank & Bemanke (2007) didefinisikan sebagai perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi dan inisiatif yang memengaruhi produktifitas manusia. *Human capital* merupakan konsep ekonomi klasik. *Human capital* merupakan dapat diperoleh melalui dua cara yaitu (1) melalui jumlah kuantitas tenaga kerja/ SDM, semakin banyak tenaga kerja semakin meningkat human capitalnya; (2) melalui investasi, yaitu pendidikan dan pelatihan yang akan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM sehingga produktivitasnya meningkat. Todaro

¹⁹ Dana, L.P., L. Korot, and G. Tovstiga .2005." A cross-national comparison of knowledge management practices, International Journal of Manpower. 2005. 26. 1. ABI/INFORM Global. Pg. 10.

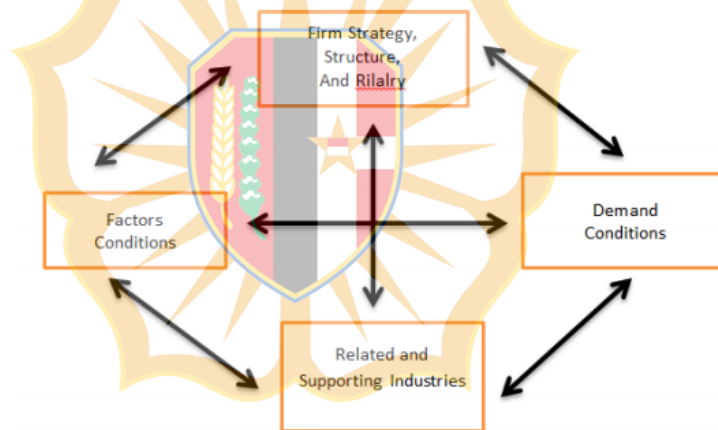
²⁰ Mireille Merx, C. and W.J. Nijhof. 2005."Factors influencing knowledge creation and innovation in an organization. Journal of European Industrial Training.2005. 29. 2/3. ABI/INFORM Global. pg. 135.

menyebutkan bahwa human capital diukur melalui bidang pendidikan dan kesehatan²¹.

e. **Teori Daya Saing**

Porter mendefinisikan daya saing nasional (*national competitiveness*) sebagai sebuah kemampuan sebuah bangsa untuk berinovasi demi mencapai, atau memelihara, sebuah posisi menguntungkan (*advantageous position*) atas bangsa lain dalam sejumlah sektor industri kunci. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa industri memegang peran penting dalam menciptakan daya saing nasional. Daya saing nasional digambarkan dalam *The Diamond of National Advantage*, yang terdiri dari faktor kondisi, permintaan, Industri yang berhubungan dan mendukung, Strategi, Struktur, dan Persaingan²².

Gambar 2. *The Diamond of National Advantage*



Sumber : Wilson Rajagukguk, 2016.

10. **Data / Fakta**

Pembangunan SDM di Indonesia belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal tersebut dapat dilihat capaian indeks modal manusia, indeks pembangunan

²¹ Afid Nurkholis. 2018. "Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory". https://www.researchgate.net/publication/326142885_TEORI_PEMBANGUNAN_SUMBERDAYA_MANUSIA_Human_Capital_Theory_Human_Investment_Theory_Human_Development_Theory_Sustainable_Development_Theory_People_Centered_Development_Theory diakses pada 22 Februari 2021.

²² Wilson Rajagukguk. 2016. "Daya Saing (Competitiveness) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Negara: Studi Kasus Negara Berkembang". Proceeding Maranata Economics & Business Conference 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha

manusia, dan *Programme for International Student Assessment (PISA)*, *education index*, indeks kesehatan global, indeks perkembangan anak dan *Global Innovation Index (GII)*. Pada tahun 2020, indeks modal manusia atau *Human Capital Index (HCI)* Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Dunia berada di peringkat 87 dari 174 negara dengan skor 0,54 . Indonesia berada dibawah Singapura, Vietnam, Malaysia dan Thailand. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* Indonesia versi *United Nations Development Programme (UNDP)* juga masih rendah yaitu berada di peringkat 111 dari 189 negara . Daya saing Indonesia berdasarkan penilaian *International Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Yearbook (WCY)* tahun 2020 berada diperingkat 40 dimana sebelumnya berada di peringkat 32.

Di bidang kesehatan, Kualitas kesehatan di Indonesia saat ini masih rendah, hal ini dapat dilihat dari Indeks Kesehatan Global Indonesia. Pada tahun 2017, berdasarkan laporan *The Legatum Prosperity Index*, Indonesia berada di peringkat 101 dari 149 negara. Indeks ini diukur berdasarkan kesehatan fisik, mental, infrastruktur dan perawatan pencegahan wabah²³. Indeks perkembangan anak Indonesia yang dirilis WHO-UNICEF pada tahun 2020, berada pada peringkat 117 dari 180 negara. Indeks ini menunjukkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan anak Indonesia²⁴. Kondisi anak Indonesia belum ideal untuk berkembang menjadi SDM unggul. Indonesia juga masih dihadapkan dengan permasalahan kematian ibu dan bayi, penyakit menular dan tidak menular, pola hidup yang tidak sehat dan keterbatasan fasilitas dan SDM kesehatan. Semua penduduk Indonesia juga belum tercover oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

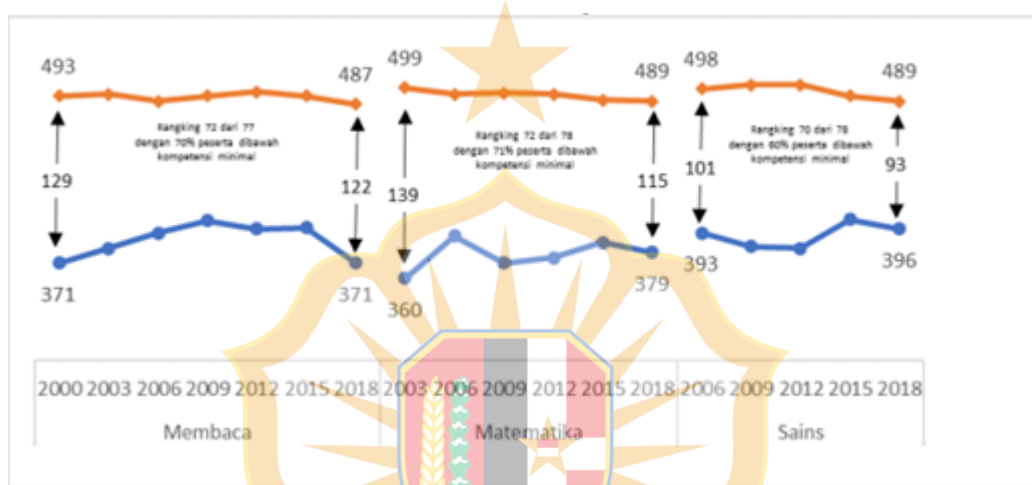
Pada bidang pendidikan, PISA ada di level yang memprihatinkan. Pada tahun 2018, nilai kompetensi literasi membaca Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Skor ini mengalami penurunan dari penilaian di periode sebelumnya yakni peringkat 62 dari 70 negara di 2015. Secara lebih detail, kemampuan membaca siswa Indonesia hanya sekitar 30%, dimana negara-negara lain yang masuk dalam OECD (The Organisation for Economic

²³ Yantina Debora. 2017. "Indeks Kesehatan Indonesia Masih Sangat Rendah". <https://tirto.id/cBRn> diakses pada 12 Mei 2021.

²⁴ Tim CNN Indonesia. 2020. "Kesehatan Anak Indonesia Peringkat 117 di Dunia". <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200219120306-284-476063/kesehatan-anak-indonesia-peringkat-117-di-duniav> diakses pada 12 Mei 2021.

Cooperation and Development) mencapai 70 %, pada kemampuan matematika sebesar 28% dari nilai rata-rata 76 %, dan kemampuan sains hanya 40 % dari rata-rata 78 %. Dengan kondisi ini, artinya siswa Indonesia kesulitan untuk mengidentifikasi sebuah fenomena berdasarkan ilmu pengetahuannya . Peringkat Indonesia di antara lima negara di Asia Tenggara yang masuk OECD hanya unggul dari Filipina. Berikut adalah grafik capaian PISA Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2018.

Gambar 3. Grafik Capaian PISA Tahun 2000 - 2018



Sumber : OECD, 2019.

Penyebab capaian pendidikan di Indonesia rendah antara lain kurangnya guru berkualitas, persebaran guru yang terbatas, sarana belajar di sekolah yang terbatas dan kurikulum yang kurang merangsang berkembangnya daya kritis (*critical thinking*) dan daya kreatif (*creative thinking*) para siswa. Selain itu, Pada aspek pendidikan, *education index* Indonesia pada tahun 2017 berada di peringkat ke tujuh di Asean dengan skor 0,622²⁵.

Di bidang iptek, Indonesia dihadapkan pada minimnya penguasaan iptek yang salah satunya disebabkan oleh minimnya riset yang mempengaruhi inovasi. *Global Innovation Index* (GII) Indonesia pada tahun 2019 berada di peringkat 85 dari 129 negara dengan skor 29,72 dari skala 0-100. Capaian GII tersebut menunjukkan masih rendahnya penguasaan iptek dan inovasi di Indonesia. Rendahnya penguasaan iptek di Indonesia dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, jumlah paten, publikasi sains dan teknik di tingkat global, infrastruktur

²⁵ Scholastica Gerintya. 2019. "Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah". <https://tirto.id/dnvR> diakses pada 12 Mei 2021.

litbang, kualitas dan kuantitas SDM riset, dan ekosistem inovasi di Indonesia masih rendah. Di sisi lain, sinergi *triple helix* (pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri) masih rendah dimana hasil riset dan inovasi perguruan tinggi belum menjawab kebutuhan dunia industri. Riset yang dilakukan lebih didominasi untuk kepentingan akademis yang tidak dapat langsung diterapkan di bidang industri. Sehingga sumbangsih inovasi untuk industri rendah. Kontribusi iptek terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 1 %.²⁶

Pada sisi pembangunan karakter bangsa, Indonesia dihadapkan pada degradasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya krisis akhlak dan moral di masyarakat, semakin maraknya konflik sosial budaya di masyarakat, penyelenggaraan negara atau perilaku ekonomi yang sarat akan KKN, mengabaikan akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut menyebabkan buruknya kualitas pelayanan publik yang dapat berdampak kepada peningkatan pengangguran, kemiskinan, gizi buruk dan lain-lain²⁷.

Pembangunan SDM di Indonesia juga berkaitan erat dengan permasalahan kemiskinan. Berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020 oleh BPS presentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19 persen, meningkat 0,41 persen pada Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen pada September 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Pandemi covid-19 meningkatkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen, naik 1,84 persen dibandingkan Agustus 2019 sebesar 5,23 persen. Sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja atau 14,28 persen terdampak pandemi Covid-19 pada Agustus 2020.²⁸

²⁶ Ananda Syaifullah, 2019, "Perbanyak SDM Iptek Demi Menuju Indonesia Maju", http://indonesiabaik.id/motion_grafis/perbanyak-sdm-iptek-demi-menuju-indonesia-maju, diakses pada 22 Februari 2021.

²⁷ Abdullah Taufik.2015."Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi". Universum. Vol. 9 No. 1

²⁸ Mela Arnani. 2021. "Angka Kemiskinan Indonesia Naik, Ini Data Per Provinsi". <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all>. Diakses pada 22 Maret 2021

Dari hasil capaian diatas dapat diketahui bahwa kualitas SDM Indonesia rendah yang berpengaruh pada rendahnya daya saing SDM. Rendahnya kualitas SDM di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kesehatan, pendidikan, penguasaan iptek dan karakter bangsa.

11. Lingkungan Strategis

a. Internasional dan Regional

Capaian kinerja pembangunan SDM di Indonesia saat ini masih rendah, hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari capaian indeks modal manusia, indeks pembangunan manusia, PISA dan daya saing bangsa di tingkat global. Pandemi covid- 19 yang melanda dunia saat ini juga menjadi tantangan bagi semua bangsa di dunia bagaimana tetap dapat membangun sumber daya manusia di tengah berbagai kesulitan dan keterbatasan yang ada.

Kesehatan, pendidikan dan penguasaan iptek menjadi komponen penting dalam pembangunan SDM Indonesia. Pembangunan SDM tidak dapat dilakukan sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Pada bidang kesehatan, Indonesia terus memegang komitmennya sebagai bagian dari *World Health Organization* (WHO). Bentuk komitmen Indonesia terhadap WHO seperti melaksanakan *International Health Regulations* (IHR) 2005 yang menuntut kemampuan deteksi dini, pencegahan dan respon cepat terhadap munculnya penyakit/kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Indonesia juga berkomitmen melaksanakan agenda pembangunan kesehatan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)²⁹ dan melakukan *joint statement* (Pernyataan Bersama) Menteri Kesehatan ASEAN dalam meningkatkan respon kolektif penanganan Covid-19 di kawasan ASEAN.

Pada bidang pendidikan dan penguasaan iptek, Indonesia aktif bekerjasama baik bilateral ataupun multilateral. Pada lingkup ASEAN, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa terpilih dari negara- negara ASEAN, mahasiswa Indonesia juga menerima beasiswa

²⁹ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

dari ASEAN-Japan Scholarship Fund, ASEAN-EU Cooperation and Scholarships Day. Indonesia juga terus aktif dalam ASEAN Council of Teachers (ACT) sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN dan dalam olimpiade regional Asia Tenggara di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota ASEAN³⁰. Di kancah internasional, Indonesia juga aktif mengirimkan peserta olimpiade.

b. Perkembangan Nasional

Perkembangan nasional kualitas sumber daya manusia bersifat saling mempengaruhi pada gatra-gatra ketahanan nasional. Pada masing-masing gatra memiliki hubungan antara aspek tri gatra dan panca gatra. Pembangunan sumber daya manusia saling mempengaruhi pada gatra sumber daya alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Gatra Sumber Kekayaan Alam, Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah, seperti hutan, lautan, minyak bumi, gas alam dan batu bara³¹. Pengelolaan sumber kekayaan alam yang dimiliki Indonesia membutuhkan SDM yang berkualitas sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional tanpa mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang. Pengelolaan sumber daya alam yang tepat juga akan meningkatkan daya saing dan daya tawar bangsa mengingat besarnya potensi sumber daya alam Indonesia.

Gatra Demografi, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045³². Distribusi persebaran penduduk sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa³³. Besarnya jumlah SDM di Indonesia dapat menjadi peluang ataupun ancaman. Menjadi peluang bagi

³⁰ Serafica Gischa. 2021. "Bentuk Kerja Sama ASEAN di Bidang Pendidikan". <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/11/120000569/bentuk-kerja-sama-asean-di-bidang-pendidikan>. Diakses pada 19 Mei 2021

³¹ Arum Sutrisni Putri.2020."Potensi Sumber Daya Alam Indonesia". Di akses pada 14 Maret 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/28/110000269/potensi-sumber-daya-alam-indonesia?page=all> diakses pada 14 Maret 2021.

³² Muhammad Idris, 2020, "BPS: Penduduk Indonesia Diprediksi Capai 319 Juta Jiwa di 2045", <https://money.kompas.com/read/2020/02/14/181000126/bps--penduduk-indonesia-diprediksi-capai-319-juta-jiwa-di-2045?page=all>, diakses pada 14 Maret 2021.

³³ BPS, 2016, "Distribusi Persentase Penduduk 2000 – 2015", <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07/843/distribusi-persentase-penduduk-menurut-provinsi-2000-2015.html>, diakses pada 14 Maret 2021.

kemajuan bangsa, jika jumlah SDM yang berlimpah tersebut berkualitas dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Sebaliknya, akan menjadi ancaman bagi bangsa ketika banyaknya jumlah SDM tersebut tidak diimbangi dengan kualitas baik sehingga menimbulkan permasalahan dan beban bagi pembangunan nasional.

Gatra Ideologi, saat ini implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat mengalami degradasi / penurunan. Kondisi ini akan berdampak semakin pudarnya karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan. Indonesia tidak hanya membutuhkan SDM yang pandai secara intelektual tetapi juga SDM yang berwawasan kebangsaan sehingga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk membangun bangsa dan negara Indonesia.

Gatra Politik, dalam upaya membangun SDM yang berwawasan kebangsaan guna meningkatkan daya saing, Pemerintah memiliki beberapa kebijakan yang dituangkan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, dan Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010 – 2025.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar 20% untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik. Dalam upaya menyikapi revolusi industri 4.0, Pemerintah memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan. Khusus sektor kesehatan, Pemerintah terus mengoptimalkan capaian atas alokasi 5% anggaran untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan/sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.³⁴

³⁴ Kemenkeu RI.2020. "Ini Upaya Pemerintah Perbaiki Kualitas SDM Indonesia". <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-upaya-pemerintah-perbaiki-kualitas-sdm-indonesia/> diakses ada 14 Maret 2021.

Gatra Ekonomi, selama 5 tahun terakhir yaitu 2014 sampai dengan 2019 rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%. Pandemi covid-19 menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi mencapai - 2,07% (*Year over Year/YoY*) pada 2020. Penurunan pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan anggaran Pemerintah termasuk sektor- sektor yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM dan daya saing bangsa³⁵. Pandemi covid-19 selain berdampak buruk pada sektor kesehatan juga ekonomi masyarakat.

Gatra Sosial Budaya, Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 9,41 %. Walaupun terus menurun, tetapi secara kuantitas terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Pandemi covid-19 juga meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kemiskinan menyebabkan penduduk sulit untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sehingga inovasi rendah dan kesejahteraan masyarakat berjalan ditempat dan dalam skala luas berdampak pada penurunan daya saing bangsa.

Pada permasalahan ketenagakerjaan, Indonesia masih dihadapkan dengan ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja serta tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Pandemi covid-19 juga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia serta penurunan kesempatan kerja akibat banyaknya sektor industri dan ekonomi lainnya yang terdampak.

Era globalisasi dan revolusi industri 4.0 mengubah pola pikir, gaya hidup, serta cara berinteraksi antar manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya teknologi otomatisasi untuk mencapai efektifitas dan efisiensi, penggunaan media sosial sebagai sarana berbagi informasi, kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui internet serta masuknya berbagai paham, budaya dari negara lain ke Indonesia dengan cara yang

³⁵ Ragimun.2021." Menguatkan Ekonomi Indonesia 2021".

<https://analisis.kontan.co.id/news/menguatkan-ekonomi-indonesia-2021#:~:text=Pertumbuhan%20ekonomi%20Indonesia%202021%20diperkirakan,juga%20memprediksi%204%2C5%25>. Diakses pada 14 Maret 2021.

mudah. Dibutuhkan SDM yang berkualitas dan berwawasan kebangsaan untuk dapat mengoptimalkan peluang di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 serta meminimalkan dampak negatifnya.

12. Peluang dan Kendala

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis, Indonesia memiliki peluang dan kendala dalam pembangunan SDM berwawasan kebangsaan guna meningkatkan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0, sebagai berikut :

a. Peluang

Indonesia memiliki sumber kekayaan alam berlimpah baik hutan, lautan, minyak bumi, gas alam dan batu bara. Sumber kaya alam yang dapat dikelola dengan baik akan menjadi modal dalam pembangunan SDM dan juga sebaliknya pembangunan SDM akan berpengaruh kepada cara bangsa dalam mengolah dan mengelola sumber daya alam tersebut. Bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar diperkirakan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045. Pengelolaan yang tepat terhadap SDM yang dimiliki Indonesia akan berdampak pada kualitas daya saing bangsa.

Pada sisi ideologi, Indonesia memiliki Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat digunakan sebagai filter atas segala nilai, budaya dari luar. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dalam Pancasila, akan terbentuk SDM berwawasan kebangsaan yang cinta akan tanah air.

Pada sisi regulasi, Indonesia memiliki regulasi yang cukup dalam upaya pembangunan SDM, karakter bangsa serta daya saing. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing juga menjadi agenda pembangunan Pemerintah saat ini. Komitmen tersebut juga diperkuat dengan penguatan anggaran yang berkaitan dengan pembangunan SDM yaitu pendidikan, iptek dan kesehatan. Peluang tersebut juga semakin besar dengan adanya kerjasama Pemerintah dengan organisasi-organisasi baik di tingkat internasional, regional ataupun nasional seperti UNDP.

b. Kendala

Dalam membangun SDM, Indonesia dihadapkan pada beberapa kendala. Kemiskinan di Indonesia menyebabkan masyarakat miskin sulit untuk mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak. Pandemi covid-19 berdampak signifikan pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pandemi covid-19 menjadi kendala dalam pembangunan SDM karena menyerang kesehatan seseorang, dari aspek ekonomi terjadi kontraksi kinerja ekonomi, peningkatan jumlah pengangguran sehingga menambah angka kemiskinan. Di sisi lain, perubahan metode pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) mengancam kualitas pendidikan di Indonesia.

Permasalahan lain adalah ketimpangan seperti ketimpangan pembangunan sarana prasarana dan pendapatan yang berkontribusi pada ketimpangan kualitas SDM antar wilayah di Indonesia. Dampak negatif era globalisasi dan revolusi industri 4.0 juga menjadi kendala dalam pembangunan SDM di Indonesia. Pada sisi penyelenggaraan Pemerintahan, Indonesia masih dihadapkan dengan tingginya korupsi di Indonesia yang berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik baik di bidang kesehatan, pendidikan ataupun inovasi.



BAB III

PEMBAHASAN

13. Umum

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia belum mencapai hasil yang optimal yang berdampak pada rendahnya daya saing bangsa. Rendahnya daya saing bangsa disebabkan oleh rendahnya daya saing SDM. Kualitas daya saing SDM Indonesia yang masih rendah disebabkan oleh permasalahan di beberapa aspek yaitu pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan penguasaan iptek. Permasalahan tersebut harus segera diatasi, pemerintah harus berbenah membangun SDM Indonesia apalagi di era revolusi industri 4.0 dengan tuntutan semakin tinggi.

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya pembangunan SDM melalui pembangunan kesehatan, pendidikan dan inovasi. Upaya tersebut harus dikuatkan karena masih terdapat kelemahan-kelemahan yang menjadikan *output* dari upaya tersebut tidak maksimal. Bab ini menyajikan analisis yang didukung dengan data dan fakta berkaitan dengan daya saing SDM Indonesia, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan, dan pembangunan inovasi, hubungan antara pembangunan SDM dan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0. Pembangunan SDM tidak hanya sebatas secara intelektual tetapi juga karakter. Sehingga terbentuk SDM berwawasan kebangsaan dimana keunggulan kompetitif yang dimilikinya akan digunakan untuk mendukung suksesnya pembangunan nasional dan mengantarkan Indonesia menjadi negara berdaya saing di era revolusi industri 4.0. Dalam setiap pokok bahasan dilengkapi dengan analisis berdasarkan teori yang sesuai dan penguatan yang dapat dilakukan.

14. Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia

SDM diartikan beragam oleh para ahli, ada yang memaknainya dalam arti mikro seperti skala organisasi/ perusahaan, dan ada yang mengartikan secara makro. A.A. Mangkunegara, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan mengartikan SDM secara makro sebagai seluruh kemampuan atau potensi penduduk di suatu wilayah tertentu beserta karakteristik

demografis, sosial, dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan³⁶. Kualitas SDM baik secara fisik ataupun mental akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan suatu bangsa.

Kualitas SDM oleh Selo Sumarjan dibagi menjadi fisik dan non fisik. Fisik meliputi kesehatan, kekuatan jasmani, ketrampilan dan ketahanan serta non fisik meliputi kemandirian, ketekunan, kejujuran, akhlak. Berdasarkan teori Selo Sumarjan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk kesehatan, pendidikan, dan karakter dapat menjadi indikator kualitas SDM di Indonesia³⁷. Kualitas kesehatan di Indonesia saat ini masih rendah, hal ini dapat dilihat dari *Indeks Kesehatan Global Indonesia* tahun 2017 yang berada di peringkat 101 dari 149 negara³⁸. Indeks perkembangan anak Indonesia yang dirilis WHO- UNICEF pada tahun 2020, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 117 dari 180 negara³⁹. Pada aspek pendidikan, *education index* Indonesia pada tahun 2017 berada di peringkat ke tujuh di Asean dengan skor 0,622⁴⁰. Capaian PISA di Indonesia juga masih rendah serta menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan Indonesia berjalan lambat.

Dari segi kualitas non fisik dapat dilihat dari karakter/ moral SDM. Saat ini dapat dikatakan bahwa karakteristik SDM Indonesia semakin terdegradasi dan jauh dari nilai- nilai luhur Pancasila seperti kejujuran, saling menghormati, toleransi, dan cinta tanah air. Hal ini menjadi salah satu pendorong digagasnya gerakan revolusi mental pada masa Pemerintah Presiden Joko Widodo. Indonesia saat ini melakukan tindakan korektif terhadap karakter SDM melalui revolusi mental⁴¹. Berdasarkan capaian – capaian tersebut, serta semakin terdegradasinya

³⁶ A.A. Mangkunegara. 2001. "Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan". Bandung: PT Remaja Rosda Karya. hal. 56

³⁷ -. -. "Kualitas Sumber Daya Manusia". https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/754/jbptunikompp-gdl-deranofand-37675-3-unikom_d-i.pdf diakses pada 12 Mei 2021.

³⁸ Yantina Debora. 2017. "Indeks Kesehatan Indonesia Masih Sangat Rendah". <https://tirto.id/cBRn> diakses pada 12 Mei 2021.

³⁹ Tim CNN Indonesia. 2020. "Kesehatan Anak Indonesia Peringkat 117 di Dunia". <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200219120306-284-476063/kesehatan-anak-indonesia-peringkat-117-di-duniav> diakses pada 12 Mei 2021.

⁴⁰ Scholastica Gerintya. 2019. "Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah". <https://tirto.id/dnvR> diakses pada 12 Mei 2021.

⁴¹ Nerry Kristina. 2019. "Mutu Sumber Daya Manusia melalui Revolusi Mental". <https://writing-contest.bisnis.com/read/20191201/557/1176563/mutu-sumber-daya-manusia-melalui-revolusi-mental> diakses pada 12 Mei 2021.

karakter atau moral SDM di Indonesia dapat dikatakan bahwa kualitas SDM di Indonesia rendah. Secara lebih mendalam, berikut adalah penyebab rendahnya kualitas SDM di Indonesia :

a. **Perlindungan sosial yang belum optimal**

Dalam upaya memberikan perlindungan sosial bagi penduduk Indonesia, pemerintah memberikan bantuan sosial, subsidi, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Di masa pandemi covid-19, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakatnya. Permasalahan perlindungan sosial di Indonesia adalah akurasi dan kelengkapan data, prosedur yang panjang dan lama. Pada aspek jaminan sosial kesehatan masyarakat, belum semua penduduk tercover oleh jaminan kesehatan dimana pada tahun 2018 baru mencapai 83,3 %, peserta jaminan kesehatan yang tidak aktif terus meningkat, sistem monitoring dan evaluasi masih parsial dan belum terintegrasi dengan baik⁴².

b. **Pelayanan dasar yang belum optimal**

Pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan di Indonesia terus mengalami perbaikan. Pada layanan dasar kesehatan, prevalensi stunting pada balita berhasil diturunkan dimana pada tahun 2013 sebesar 37,2 % dan di tahun 2019 sebesar 27,7 %, angka kematian per 100.000 kelahiran juga berhasil ditekan dari 346 pada tahun 2010 menjadi 305 pada tahun 2015. Pada pelayanan dasar pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas berhasil ditingkatkan dimana pada tahun 2014 sebesar 8,22 tahun menjadi 8,52 pada akhir tahun 2018⁴³.

Peningkatan capaian pelayanan dasar tersebut belumlah optimal. Pada pelayanan dasar kesehatan, Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan kematian ibu dan bayi, *stunting*, penyakit, pola hidup, akses air minum dan sanitasi serta fasilitas dan SDM kesehatan.

- 1) Kematian ibu di Indonesia merupakan tertinggi di Asia Tenggara. Angka kelahiran umur 15-19 tahun masih tinggi yang disebabkan rendahnya

⁴² Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

⁴³ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Hal. 8 - 25

pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak⁴⁴.

- 2) Prevalensi *stunting* masih tinggi karena keterbatasan pola asuh orang tua⁴⁵.
- 3) Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria) masih tinggi ditambah dengan covid-19 yang penularannya sangat cepat dan mudah⁴⁶.
- 4) Pola hidup tidak sehat masyarakat dan kondisi lingkungan yang memburuk seperti polusi juga menjadi permasalahan kesehatan⁴⁷.
- 5) Akses air minum layak di Indonesia masih rendah. Dimana tahun 2018, akses air minum perpipaan hanya menjangkau 20,14 % dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Untuk akses sanitasi, Indonesia berada diperingkat ke 3 dunia pada perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang mencapai 25 juta jiwa penduduk Indonesia⁴⁸.
- 6) Sarana prasarana dan SDM kesehatan belum mencukupi dan masih menumpuk di Jawa Bali. Sebanyak 1.513 puskesmas di Indonesia atau 15 % dari jumlah seluruh puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter, yang didominasi oleh Provinsi Maluku, Papua, Papua Barat dan Maluku Utara. Rasio minimal puskesmas per Kecamatan di Indonesia adalah 1. Tetapi di Papua Barat, masih dijumpai 1 Puskesmas untuk sekitar 4 Kecamatan. Rasio dokter di Indonesia adalah 4,27 per 10 ribu penduduk dan untuk dokter spesialis 1,46 per 10 ribu penduduk⁴⁹. Rasio dokter tersebut sangat jauh dari standar WHO yaitu 1 dokter per 1000 penduduk⁵⁰. Ketimpangan sarana prasarana dan SDM kesehatan di

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Hal. IV.6

⁴⁹ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Hal. 25 - 27

⁵⁰ Anindhita Maharrani , Nanang Syaifudin. 2020. "Distribusi tenaga kesehatan tak kunjung merata". <https://lokadata.id/artikel/distribusi-tenaga-kesehatan-tak-kunjung-merata> diakses pada 1 Juni 2021.

Indonesia serta penumpukannya dapat dilihat pada grafik 1 sampai 5 yang ada lampiran 1.

Pada pelayanan dasar pendidikan, Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan anak tidak sekolah, partisipasi pendidikan, kesenjangan kualitas pendidikan dan ketimpangan sarana prasarana pendidikan dan pengajar.

- 1) Di Indonesia masih terdapat 4,4 juta anak usia 7 – 18 tahun tidak bersekolah. Banyaknya anak tidak sekolah (ATS) disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar sektoral dalam meminimalkan hambatan ekonomi, sosial, budaya, geografi serta pola pelayanan anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, pernikahan, ibu remaja atau pekerja anak⁵¹. Di Papua, lebih dari 50 % anak usia 3 - 19 tahun tidak sekolah, di NTB sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pendidikan sehingga banyak anak yang putus sekolah dan 16,8 % penduduk NTB buta huruf⁵².
- 2) Partisipasi pendidikan masih rendah. Semakin meningkat kelompok semakin rendah partisipasinya yang dapat dilihat pada angka dan sebaran partisipasi sekolah di Indonesia. Statistik tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di lampiran 2 dan pada gambar 1 di lampiran 3. Beberapa wilayah di Indonesia juga menunjukkan bahwa angka partisipasi pendidikannya berada dibawah angka partisipasi nasional. Kondisi tersebut berkontribusi pada besarnya penduduk Indonesia yang berpendidikan kurang dari SD sampai dengan SMP / sederajat. Seperti pada tahun 2018 sebesar 64,9 % penduduk Indonesia berpendidikan kurang dari SD sampai dengan SMP/ sederajat⁵³. Perguruan tinggi di Indonesia juga belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai *research university*, *teaching university* dan *vocational university*. Sebagai perbandingan, keahlian tenaga kerja lulusan

⁵¹ Ibid.

⁵² Anco. 2018. "Ketimpangan Pendidikan Indonesia Timur dan Barat". <https://sultrakini.com/berita/ketimpangan-pendidikan-indonesia-timur-dan-barat> diakses pada 25 April 2021.

⁵³ Subandi Sardjoko.2020. "Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam RPJMN 2020-2024: Menuju Indonesia Maju". Disampaikan di Jakarta tanggal 10 Maret 2020.

Pendidikan Tinggi di Indonesia setara keahlian tenaga kerja lulusan SMA ke bawah di Denmark⁵⁴.

- 3) Kesenjangan kualitas pendidikan juga terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata nilai ujian nasional 2019, dimana 20 sekolah menengah atas dengan peringkat tertinggi ada di pulau Jawa terutama sekitar wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Kondisi pendidikan di Indonesia Timur juga sangat memprihatinkan, berdasarkan data dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) terdapat sekitar 800 ribu anak-anak putus sekolah di kawasan Indonesia Timur. Kawasan Indonesia Timur juga masih memiliki angka buta huruf yang tinggi, 3 provinsi di Indonesia dengan presentase tertinggi penduduk buta huruf berasal dari Indonesia Timur, yaitu Provinsi Papua (36,31 persen), Nusa Tenggara Barat (16,48 persen) dan Sulawesi Barat (10,33 persen)⁵⁵.
- 4) Ketimpangan sarana prasarana pendidikan dan pengajar juga masih terjadi di Indonesia. Ketimpangan ini terutama antara wilayah Jawa Bali dan Indonesia Timur. Di Papua, masih dijumpai sekolah dengan fasilitas seadanya dan kualitas pengajar yang kurang kompeten. Di Maluku, keterbatasan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar menjadi faktor penghambat pendidikan. Di NTT, hampir 50 % dari jumlah total 800 guru hanya lulusan SMA/ sederajat⁵⁶. Pada tahun 2020, di wilayah tengah dan timur Indonesia jumlah guru setiap provinsi kurang dari 50.000, bahkan tidak sampai 15.000 orang, yaitu Kalimantan Utara (10.040), Papua Barat (14.115), dan Gorontalo (14.690)⁵⁷. Sebaran guru di Indonesia dapat dilihat gambar 2 lampiran 3.

Ketimpangan akses internet juga masih terjadi antara Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Survei Asosiasi

⁵⁴ Bernarda Rurit dan Nugroho Dewanto.2020. "SDM Unggul Adalah Koentji Indonesia Menoedjoe 2045". Jakarta : Lemhannas. Hal 320 – 322.

⁵⁵ Anco. 2018. "Ketimpangan Pendidikan Indonesia Timur dan Barat". <https://sultrakini.com/berita/ketimpangan-pendidikan-indonesia-timur-dan-barat> diakses pada 25 April 2021.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Slamet JP. 2020. "Jumlah Guru di Indonesia". <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/jumlah-guru-di-indonesia> diakses pada 15 Mei 2021.

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada kuartal II tahun 2020 menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7 % dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah pengguna internet tersebut 56,4 % berada di Pulau Jawa, 22,1 % Sumatera, Sulawesi 7 %, Bali dan Nusa Tenggara 5,2 %, Maluku dan Papua 3 %. Penyebab rendahnya akses internet karena dukungan infrastruktur yang belum optimal, palapa ring yang terbatas, kesenjangan populasi penduduk yang cukup tinggi di wilayah 3T, faktor geografis, keadaan alam, faktor cuaca, bencana alam⁵⁸. Dengan kondisi ini, artinya peserta didik di wilayah Indonesia Timur memiliki peluang yang kecil untuk dapat menikmati Internet sebagai sarana dalam mendukung pembelajaran.

c. Permasalahan kualitas anak, perempuan dan generasi muda

Kualitas anak, perempuan dan generasi muda masih dihadapkan dengan permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak, kesetaraan gender, perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal. Indeks Perlindungan Anak Indonesia baru mencapai 62,7 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, sekitar 59,2 % anak di dalam lapas belum mendapatkan akses pendidikan. Pada tahun 2018 sebanyak 16,4 % anak belum memiliki akta kelahiran. Pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 11, 21 %. Sebanyak 1,9 % pelajar dibawah usia 15 tahun narkoba dalam 1 tahun terakhir⁵⁹.

Permasalahan kualitas perempuan dihadapkan pada kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat dan semakin beragam. Pada tahun 2018 terjadi sebanyak 348.466 kasus kekerasan dan meningkat menjadi 406.178 kasus pada tahun 2019. Kekerasan tersebut terdiri dari kekerasan rumah tangga sebesar 71 % dan 28 % kekerasan lainnya seperti perkosaan, pencabulan dan kekerasan seksual. Selain itu, pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 70 % adalah perempuan dan anak. Jumlah kasus TPPO pada tahun 2018 sebanyak 297 kasus⁶⁰.

⁵⁸ Wahyunanda Kusuma Pertiwi. 2020. "Melihat Besarnya Kesenjangan Internet antara Indonesia Barat dan Timur". <https://tekno.kompas.com/read/2020/11/10/20020087/melihat-besarnya-kesenjangan-internet-antara-indonesia-barat-dan-timur?page=all> diakses pada 15 Mei 2021.

⁵⁹ Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

⁶⁰ Ibid.

Permasalahan pemuda dapat dilihat pada minimnya kontribusi pemuda dalam pembangunan nasional masih minim. Hasil sensus nasional menunjukkan bahwa hanya 6,4 % pemuda terlibat aktif dalam organisasi. Penyalahgunaan narkoba oleh pemuda juga cukup tinggi, selain itu 56,5 % kasus HIV/ AIDS baru terjadi pada pemuda usia 20 – 24 tahun⁶¹.

d. **Masih tingginya angka kemiskinan**

Sebelum terjadi pandemi covid-19, Indonesia berhasil menekan angka kemiskinan. Dari 9,82 % atau sebesar 25,32 juta orang pada September 2018 menjadi 9,22 % atau sebesar 24,79 juta jiwa pada September 2019⁶². Sebagian besar kelompok miskin dan rentan miskin bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 49,8 % pada tahun 2018. Kelompok miskin yang bekerja di sektor pertanian dihadapkan dengan permasalahan rendahnya kepemilikan asset produktif, minimnya akses terhadap pembiayaan dan kurangnya pengetahuan dan ketrampilan.

Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 menyebabkan peningkatan kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan permintaan global yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah PHK dan pengangguran. Persentase kemiskinan pada September 2020 sebesar 10,19 % atau sebanyak 27,55 juta penduduk yang artinya naik sebesar 0,97 % dibandingkan September 2019. Pada Agustus 2020, jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,07 % dimana pada Agustus 2019 sebesar 5,32 %. Sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak baik jam kerjanya berkurang, dirumahkan atau di PHK⁶³. Kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan kualitas SDM, penduduk yang miskin akan sulit untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Pandemi covid-19 menambah kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil riset ISEAS-

⁶¹ Ibid.

⁶² BPS. 2020. "Persentase Penduduk Miskin September 2019 turun menjadi 9,22 persen". <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,56%20persen%20pada%20September%202019.> Diakses pada 1 Mei 2021.

⁶³ Billy Mulya Putra. 2021. "Angka Kemiskinan di Indonesia Alami Peningkatan, Kawasan Berikut Jadi Penyumbang Terbesar". <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-011441409/angka-kemiskinan-di-indonesia-alami-peningkatan-kawasan-berikut-jadi-penyumbang-terbesar?page=3> diakses pada 1 Mei 2021.

Yusof Ishak Institute Agustus 2020, menyebutkan 69 juta siswa kehilangan akses pendidikan dan pembelajaran di era pandemi. Kelompok yang kehilangan akses pendidikan dan pembelajaran rata-rata berasal dari keluarga yang kurang mampu⁶⁴.

e. **Penguasaan iptek masih rendah**

Penguasaan iptek merupakan hal yang sangat dibutuhkan bangsa dalam bersaing di era revolusi industri 4.0. Penguasaan iptek dipengaruhi oleh riset dan akan berpengaruh pada inovasi. *Global Innovation Index* (GII) Indonesia pada tahun 2019 berada di peringkat 85 dari 129 negara dengan skor 29,72 dari skala 0-100. Rendahnya GI disebabkan oleh keterbatasan anggaran, jumlah paten, publikasi sains dan teknik di tingkat global, infrastruktur litbang, kualitas dan kuantitas SDM riset, dan ekosistem inovasi di Indonesia masih rendah. Di sisi lain, sinergi *triple helix* (pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industry) masih rendah dimana hasil riset dan inovasi perguruan tinggi belum menjawab kebutuhan dunia industri.

Pada sisi anggaran, data Kemenristek menunjukkan bahwa Ketersediaan anggaran Indonesia untuk riset dan inovasi masih rendah yaitu sebesar 0,21 % pada tahun 2017, 0,28 persen pada tahun 2018, dan turun menjadi 0,25 persen pada tahun 2019. Sementara, Tiongkok pada tahun 2017 mengalokasikan 2,10%, tahun 2019 meningkat menjadi 2,14 % dan untuk Korea Selatan dan Jepang sudah di atas 3 % dari PDB.⁶⁵

Pada kuantitas SDM riset, jumlah peneliti di Indonesia saat ini hanya 1.071 per satu juta penduduk. Sementara itu Korea punya 8.000 peneliti, dengan Singapura yang mencapai 7.000 peneliti, Malaysia memiliki 2.590 peneliti dan Singapura memiliki 6.658 peneliti per satu juta penduduk. Berdasarkan data UNESCO, jumlah peneliti di Indonesia paling sedikit di antara anggota G-20 sehingga dalam 1 tahun jumlah riset di Indonesia hanya mencapai

⁶⁴ Endah Asih. 2021. "Pandemi Covid-19 Buat Kesenjangan Pendidikan Semakin Nyata di Indonesia". <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-011482458/pandemi-covid-19-buat-kesenjangan-pendidikan-semakin-nyata-di-indonesia?page=2> diakses pada 25 April 2021.

⁶⁵ Administrator. 2021. "Riset dan Inovasi Maju, Daya Saing Terpacu". <https://www.indonesia.go.id/kategori/budaya/2535/riset-dan-inovasi-maju-daya-saing-terpacu> diakses pada 2 Mei 2021.

6.260 riset. Sementara Malaysia mampu membuat 25.000 riset, Singapura menghasilkan 18.000 riset, Thailand 12.000- 13.000 riset⁶⁶.

Pihak swasta dan industri di Indonesia juga masih minim riset. Sebagai gambaran, industri farmasi dan alat kesehatan yang menguasai 70 % pasar di dalam negeri memiliki tingkat ketergantungan akan produk impor mencapai 90 %⁶⁷. Kondisi ini akan memperlemah daya saing Indonesia di era revolusi industri 4.0 yang identik dengan penguasaan dan perkembangan iptek.

f. **Semakin terdegradasinya karakter SDM Indonesia**⁶⁸

Saat ini karakter SDM Indonesia semakin terdegradasi. Implementasi nilai - nilai luhur Pancasila semakin memudar dalam kehidupan sehari- hari. Banyak budaya asing yang diserap begitu saja tanpa adanya filter. Nasionalisme semakin berkurang. Permasalahan karakter SDM Indonesia saat ini disebabkan oleh disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, bergesernya nilai-nilai etika dan agama serta adat istiadat sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang tumbuh dan berkembang ditiap daerah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila merupakan pandangan hidup yang seharusnya dimanifestasikan dalam perilaku dan kepribadian manusia Indonesia secara berimbang baik dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. Saat ini praktik Pancasila sebagai pandangan hidup semakin memudar yang dapat dilihat dari menurunnya moral, intoleransi, meningkatnya kekerasan, dampak buruk globalisasi sampai dengan peningkatan kasus KKN. Hal tersebut disebabkan terjadinya disorientasi dan belum dihayatinya nilai - nilai Pancasila sebagai pandangan hidup.

Nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga mengalami kemunduran. Saat ini penghargaan terhadap budaya bangsa, kekeluargaan, musyawarah mufakat, kejujuran, sopan santun, rasa malu dan cinta tanah air semakin memudar. Primodialisme juga semakin menguat, di mana lebih

⁶⁶ Ananda Syaifullah, 2019, "Perbanyak SDM Iptek Demi Menuju Indonesia Maju", http://indonesiabaik.id/motion_grafis/perbanyak-sdm-iptek-demi-menuju-indonesia-maju, diakses pada 22 Februari 2021.

⁶⁷ Bernarda Rurit dan Nugroho Dewanto.Op.cit. Hal 40-50.

⁶⁸ Tim Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa. 2010. " Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010 – 2025". Jakarta : Pemerintah RI. Hal 16-20.

menonjolkan ke -“kami”-an dari pada identitas ke -“kita”-an. Kepentingan kelompok dan golongan lebih diutamakan dibandingkan kepentingan bangsa. Tindakan anarkisme juga semakin meningkat. Saat ini, dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pembentukan karakter bangsa, krisis keteladanan pemimpin, penyerapan budaya global tanpa adanya filter, ketimpangan kondisi sosial ekonomi.

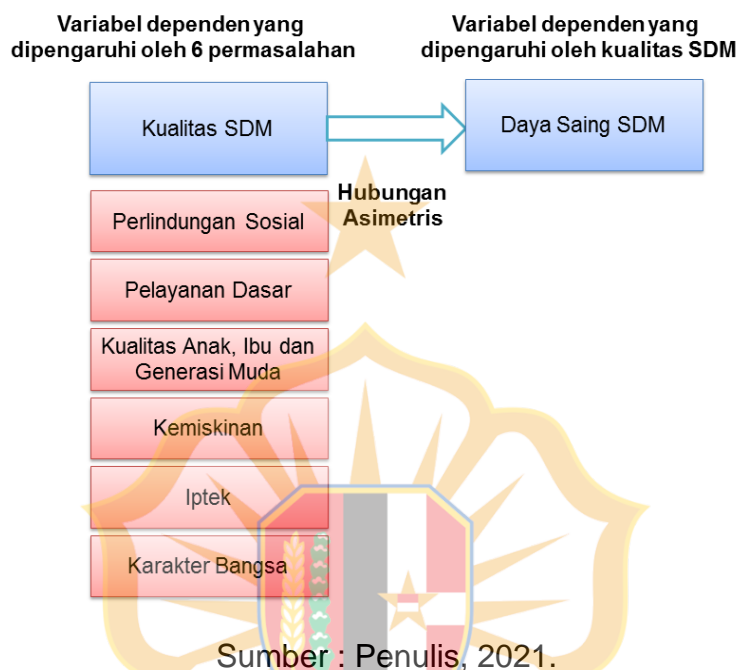
Permasalahan perlindungan sosial, pelayanan dasar, kualitas anak, perempuan dan generasi muda, kemiskinan, penguasaan iptek serta karakter bangsa berdampak pada rendahnya kualitas SDM Indonesia. Kualitas SDM yang rendah akan berdampak pada rendahnya daya saing SDM. Daya saing secara umum didefinisikan sebagai kemampuan menunjukkan keunggulan dalam hal tertentu dengan hasil kerja yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya⁶⁹. SDM yang berkualitas akan menunjukkan keunggulannya dengan hasil kerja yang lebih baik sehingga dikatakan memiliki daya saing.

Kualitas SDM berhubungan dengan daya saing SDM. Jika dianalisa menurut teori variabel dan hubungan antar variabel, dalam konteks penelitian ini dapat dikatakan bahwa kualitas SDM merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh berbagai permasalahan tersebut. Artinya variabel ini dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel daya saing SDM juga merupakan variabel dependen karena dipengaruhi oleh bagaimana kualitas SDM. Hubungan antara variabel kualitas dan daya saing SDM adalah asimetris dimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, namun sifatnya tidak timbal balik⁷⁰. Artinya tingkat kualitas SDM akan mempengaruhi daya saing SDM. Hubungan antara permasalahan, kualitas, dan daya saing SDM dapat digambarkan sebagai berikut :

⁶⁹ Rulyanti Susi Wardhani Dan Yulia Agustina.-. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Daya Saing Pada Sentra Industri Makanan Khas Bangka Di Kota Pangkalpinang”. Jurnal Akuntansi Universitas Jember

⁷⁰ Malik. 2019. “Pengertian Variabel Penelitian Adalah : Contoh, Jenis, & Cara Menentukannya”. <https://www.kudupinter.com/2019/09/variabel-penelitian-adalah-pengertian.html> diakses pada 12 Mei 2021.

Gambar 4. Hubungan antara kualitas SDM dan daya saing SDM



15. Penguatan Pembangunan Kesehatan Untuk Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia

Rendahnya daya saing SDM Indonesia disebabkan oleh masih rendahnya kualitas SDM yang salah satunya disebabkan oleh permasalahan pelayanan dasar kesehatan dan kualitas anak, perempuan dan kesehatan. Pelayanan dasar kesehatan di Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka kelahiran umur 15-19 masih tinggi, stunting, penyakit, pola hidup masyarakat, akses air minum dan sanitasi, ketimpangan sarana dan prasarana serta SDM kesehatan serta belum semua penduduk tercover oleh jaminan sosial kesehatan .

Pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu HAM. Hal ini sebagaimana pasal 25 tahun 248 tentang Deklarasi Universal HAM , bahwa setiap orang berhak akan kesehatan dirinya dan keluarga termasuk didalamnya

perawatan medis dan layanan sosial lainnya. Pembangunan kesehatan diwujudkan melalui Sistem Kesehatan Nasional (SKN). SKN diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. SKN didefinisikan sebagai pengelolaan kesehatan oleh semua komponen bangsa yang terpadu, saling mendukung untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sehingga pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang⁷¹. SKN merupakan acuan penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 -2024, pembangunan kesehatan yang merupakan implementasi dari SKN pada tahun 2020 - 2024 diarahkan pada pembangunan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC). Kesehatan semesta merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya terjangkau. Untuk mengatasi permasalahan pelayanan dasar kesehatan dan mewujudkan kesehatan semesta, Pemerintah memiliki 5 (lima) strategi yaitu (1) peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; (2) percepatan perbaikan gizi; (3) peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; (4) membudayakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan (5) penguatan sistem kesehatan⁷².

Strategi pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi dilakukan dengan peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi secara berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) serta mendorong semua persalinan dilakukan di faskes untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. **Strategi kedua**, percepatan pembangunan gizi dilakukan oleh pemerintah melalui penguatan kampanye, pemantauan dan

⁷¹ Kemenkes. -. "Naskah Akademik RUU Rumah Sakit".

http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/Naskah_Akademik_RUU_Rumah_Sakit.pdf
diakses pada 12 Mei 2021.

⁷² Kementerian Kesehatan. 2020. "Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024". Jakarta : Kementerian Kesehatan.

evaluasi perbaikan gizi, pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dan perbaikan pola asuh serta intervensi gizi spesifik. **Strategi ketiga**, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit ditujukan baik pada penyakit menular ataupun tidak menular. Saat ini, Indonesia dihadapkan pada beban penyakit yang sama beratnya. Dimana tahun-tahun sebelumnya lebih didominasi oleh penyakit tidak menular, saat ini juga dihadapkan dengan penambahan beban penyakit menular yaitu covid-19. Indonesia mengalami *Triple burden* yaitu dilanda penyakit menular, penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit yang seharusnya sudah teratasi⁷³. **Strategi ke-empat** adalah membudayakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Gernas ditujukan untuk meningkatkan pola hidup sehat masyarakat dan pembentukan lingkungan yang mendukung kesehatan. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah adalah pengembangan kawasan sehat, penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti ruang terbuka hijau, regulasi pembangunan berwawasan kesehatan dan dorongan hidup sehat, promosi pola hidup sehat dan penyediaan pilihan pangan sehat. GERMAS juga diatur dalam regulasi khusus yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas). **Strategi kelima** adalah penguatan sistem kesehatan. Penguatan sistem kesehatan oleh pemerintah difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat kesehatan, penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan, penguatan pelaksanaan JKN.

Pembangunan kesehatan melalui kesehatan semesta dengan lima strategi yang dilakukan pemerintah belumlah mencapai hasil yang optimal. Ketidakefektifan dan beberapa hal dapat dikuatkan dalam pembangunan kesehatan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Cakupan Program Jaminan Kesehatan (JKN) belum mencapai target UHC yaitu sebesar 95 % penduduk. Sampai dengan Desember 2019, cakupan JKN

⁷³ Sigerindo. 2017. "Forum Diskusi Gernas Bahas Masalah Triple Burden".

<https://www.sigerindo.com/2017/04/forum-diskusi-germas-bahas-masalah.html> Diakses Pada 2 Mei 2021.

sebanyak 224,1 juta orang sebanyak 83 % dari penduduk Indonesia⁷⁴ dimana target Pemerintah sebesar 95 %⁷⁵. Sementara untuk indeks layanan cakupan UHC pada tahun 2018, Indonesia berada di skor 60 dari 100 skor. Indeks layanan UHC tidak hanya mengukur jumlah kepesertaan, tetapi juga cakupan layanan, kualitas layanan, dan perlindungan finansial untuk kesehatan. Permasalahan ketimpangan sarana prasarana dan SDM kesehatan di Indonesia belum terselesaikan hingga saat ini. Hal tersebut berkontribusi pada capaian indeks cakupan layanan UHC dimana Provinsi di luar wilayah Jawa dan Bali sebagian indeks cakupan layanan UHC nya dibawah rata-rata nasional⁷⁶. Grafik cakupan layanan UHC Indonesia per provinsi pada tahun 2018 dapat dilihat pada grafik 6 lampiran 1.

- b. Masih tingginya *out of pocket (OOP)* Indonesia. OOP merupakan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena tidak tercover dalam jaminan sosial. Pengeluaran *out-of pocket* terdiri dari (1) biaya pelayanan pengobatan/kuratif (termasuk biaya melahirkan dan obat yang tidak dapat dirinci), (2) biaya obat (hanya obat yang dibeli di apotik, toko obat, dsb); (3) biaya pelayanan pencegahan/preventif dan (4) biaya transportasi untuk perawatan kesehatan. OOP di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 45 %, dimana standarnya adalah 20 % dari total belanja kesehatan⁷⁷. Dimana negara-negara lain seperti Malaysia dan Thailand, OOP nya sebesar 28 %.
- c. Perencanaan, penggunaan, dan monitoring evaluasi anggaran kesehatan yang belum optimal. UU no 36 tahun 2009 mengamanatkan bahwa besar anggaran kesehatan dari APBN minimum 5 % dan untuk APBD minimum 10 %. Pembiayaan kesehatan harus memegang 3 pilar, yaitu kecukupan, efisien dan

⁷⁴ The Prakarsa.2020. "Universal Health Coverage: Mengukur Capaian Indonesia". <http://theprakarsa.org/universal-health-coverage-tracking-indonesias-progress/> diakses pada 13 Mei 2021.

⁷⁵ Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. 2015. "Menkes Sampaikan Perkembangan Kepesertaan JKN kepada Menko Perekonomian". <http://www.jkn.kemkes.go.id/detailberita.php?id=78> diakses pada 13 Mei 2021.

⁷⁶ Eka Afriana dkk. 2020. "Universal Health Coverage : Capaian Saat Ini Dan Langkah Langkah Perbaikan". Jakarta : The Prakarsa

⁷⁷ Eka Afriana dkk. 2020. "Jkn, Out Of Pocket Dan Penduduk Miskin". Jakarta : The Prakarsa. Hal. 24- 27.

efektif, serta keberlanjutan⁷⁸. Sejak tahun 2016, anggaran kesehatan dari APBN sudah 5 %. Sementara untuk APBD, belum semua provinsi mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 10 % dari APBD. Anggaran kesehatan yang bersumber dari APBN terdistribusi pada Kementerian/Lembaga (K/L) dan non-K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Otonomi Khusus Papua. Grafik besaran anggaran kesehatan di Indonesia dan distribusinya dapat dilihat pada grafik 7 s.d 10 lampiran 1.

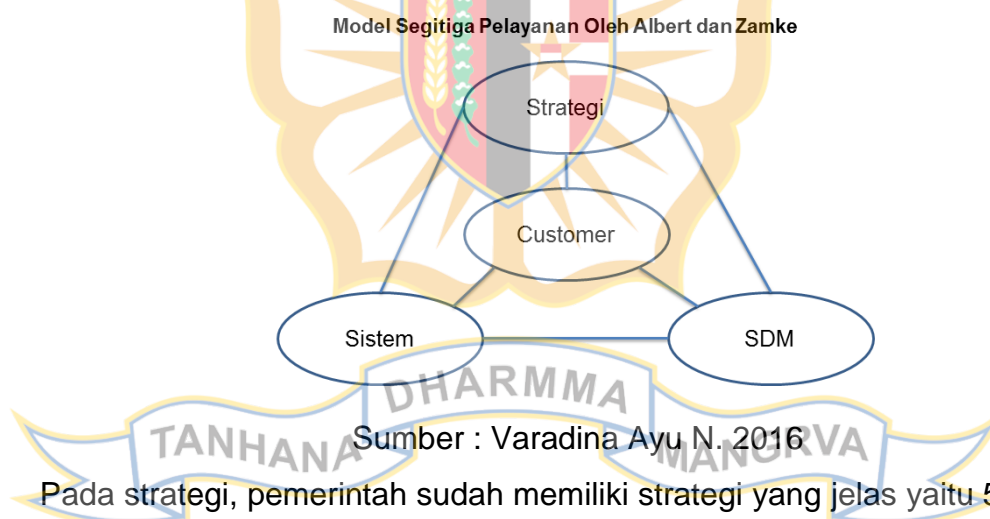
Permasalahan pada anggaran kesehatan di Indonesia adalah :

- a. Belum semua daerah di Indonesia mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 10 % dari APBD. Hal ini akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan yang dapat diberikan oleh Pemerintah terhadap masyarakat dan berkontribusi terhadap ketimpangan pelayanan kesehatan baik promotif dan preventif (pencegahan), kuratif (mengobati dan mengurangi tingkat kesakitan), rehabilitatif (kualitas hidup pasien disabilitas, terapi), dan jaminan sosial kesehatan.
- b. Besarnya belanja kesehatan pada pelayanan kuratif, yang artinya pelayanan kesehatan promotif dan preventif belum berhasil. Kegagalan ini menyebabkan peningkatan belanja pelayanan kuratif, dan jika ini terus berlanjut akan menyebabkan pemborosan belanja kesehatan.
- c. Anggaran kesehatan yang disalurkan ke lembaga lain selain Kemenkes semakin meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan monitoring dan evaluasi yang memadai.
- d. Pemerintah belum memiliki panduan teknis dalam menghitung anggaran kesehatan. Ruang lingkup anggaran kesehatan dapat diasumsikan secara beragam oleh masing- masing Lembaga ataupun daerah. Tidak adanya panduan teknis berpotensi menimbulkan duplikasi anggaran ataupun program / kegiatan yang justru tidak teranggarkan sama sekali.
- e. Waktu penyusunan anggaran yang berbeda. Pada saat penyusunan anggaran APBD, daerah tidak mengetahui alokasi DAK yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini berdampak pada perencanaan penggunaan anggaran DAK yang tidak optimal termasuk dalam penyerapannya.

⁷⁸ Tim Bappenas. 2020. "Bedah Anggaran Kesehatan". Jakarta : Bappenas.

Dari sudut pandang **teori pelayanan kesehatan masyarakat oleh Hodgetts dan Casio**, upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah belum memenuhi persyaratan pokok dalam pelayanan kesehatan yaitu tersedia, dapat diterima dan wajar, mudah dijangkau dan bermutu di beberapa daerah di Indonesia⁷⁹. Tersedia dan mudah dijangkau belum dapat dipenuhi terutama untuk provinsi dengan rasio puskesmas kurang dari 1 dan kurangnya dokter di puskesmas karena belum meratanya sarana prasarana dan SDM kesehatan antar wilayah di Indonesia. Syarat pokok kedua yaitu dapat diterima dan wajar hal tersebut juga belum dapat terpenuhi karena masih tinggi *out of pocket* di Indonesia, dan untuk syarat ketiga yaitu bermutu harus terus di tingkatkan karena indeks cakupan layanan UHC masih berada diangka 60. Dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan, dapat digunakan **model segitiga pelayanan oleh Albert dan Zamke**⁸⁰, yang terdiri dari strategi, sistem dan SDM sehingga menghasilkan pelayanan yang memuaskan *customer / pelanggan*.

Gambar 5. Model Segitiga Pelayanan oleh Albert dan Zamke



Pada strategi, pemerintah sudah memiliki strategi yang jelas yaitu 5 strategi dalam penyelenggaraan kesehatan semesta yang sudah mencakup semua permasalahan kesehatan. Kelemahannya ialah pada sisi implementasi dari strategi tersebut, sehingga belum optimal sistem pelayanan kesehatan dan manajemen SDM kesehatan. Seperti indeks cakupan layanan UHC yang masih

⁷⁹ -.-. "Pelayanan Kesehatan". <https://eprints.uny.ac.id/18662/4/4.%20Bab%20II.pdf> diakses pada 5 Juni 2021.

⁸⁰ Varadina Ayu N. 2016. "Model Pelayanan Kesehatan (Studi Deskriptif Tentang Model Pelayanan Program Antenatal care di Puskesmas Peterongan Kabupaten Jombang)". Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 4, Nomor 3.

rendah, ketimpangan sarana dan prasarana serta SDM kesehatan, dan pengelolaan anggaran kesehatan yang belum optimal.

Berdasarkan teori pendukung dan permasalahan pada penyelenggaraan sistem kesehatan nasional dimana pada tahun 2020- 2024 berfokus pada kesehatan semesta, beberapa penguatan yang dapat dilakukan adalah :

- a. Penguatan cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) dan indeks layanan cakupan UHC.

Untuk penguatan cakupan JKN dapat dilakukan dengan mendorong perusahaan untuk mendaftarkan semua karyawannya dalam program JKN, karena masih didapati perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya; mendorong kepala keluarga untuk mendaftarkan semua anggota keluarganya; dan perbaikan serta *update* data kemiskinan secara berkala untuk memastikan masyarakat miskin dan rawan miskin mendapat bantuan iuran JKN dari Pemerintah. Untuk indeks layanan cakupan kesehatan, diperlukan pemerataan sarana prasarana kesehatan dan SDM kesehatan untuk menekan ketimpangan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa masih terjadi ketimpangan distribusi sarana prasana kesehatan dan SDM kesehatan antara Jawa Bali dan diluar Jawa Bali yang cukup signifikan.

- b. Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif. Hal ini bertujuan untuk menekan *out of pocket*. Dengan meningkatkan pelayanan promotif dan preventif, masyarakat diharapkan dapat menjaga kesehatannya sehingga tidak perlu berobat ke fasilitas kesehatan. Selain itu hal ini akan menekan besarnya anggaran pelayanan kuratif yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk pelayanan lainnya.
- c. Meningkatkan sistem perencanaan, penggunaan, dan monitoring evaluasi anggaran kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan intervensi pemerintah pusat atas daerah- daerah yang alokasi anggaran kesehatannya masih 10 % dibawah APBD; penyusunan regulasi atau petunjuk teknis yang memberi batasan jelas tentang definisi dan ruang lingkup anggaran kesehatan; mekanisme pengalokasian anggaran kesehatan perlu dirumuskan dalam forum bersama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan di awal tahun dan menjelang penetapan pagu alokasi yang selanjutnya

diinformasikan ke daerah untuk dapat ditindaklanjuti dalam proses awal penyusunan APBD; proses review anggaran kesehatan perlu dilakukan secara terus menerus dan sistematis tidak hanya waktu tertentu saja. Kesepakatan dan kolaborasi antar pihak terkait diperlukan untuk peningkatan proses perencanaan anggaran di tingkat pusat dan daerah, agar visi pembangunan kesehatan dapat tercapai bersama-sama. Selain itu, Pemerintah perlu terus mengevaluasi pengelolaan BPJS Kesehatan yang selama pendiriannya terus mengalami defisit karena peserta mandiri yang berhenti ditengah jalan, praktik kecurangan ataupun perlunya review atas iuran yang dibayarkan.

Terlepas dari ketiga permasalahan dalam implementasi kesehatan semesta. Jika dikaitkan dengan sistem desentralisasi, pemerintah dapat belajar dari keberhasilan negara-negara maju seperti Jerman dan Amerika. Dalam membangun sistem kesehatan nasional, mereka lebih menekankan pada pendekatan desentralisasi, yaitu memperkuat sistem kesehatan di daerah. Hasil penelitian Mills juga menyebutkan desentralisasi struktur dan manajemen sistem kesehatan menjadi kunci keberhasilan kesehatan untuk semua⁸¹.

Sistem kesehatan nasional di Indonesia dalam pasal 2 ayat (2) Perpres No 72 Tahun 2012 telah menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan dilakukan berjenjang dengan memperhatikan otonomi daerah, hal ini juga didukung oleh UU Pemerintah daerah yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana sudah diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015. Oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan- kewenangan tertentu untuk mengatur pembangunan kesehatan di daerah dengan tetap selaras dengan kebijakan pembangunan kesehatan di pemerintah pusat. Bentuk kewenangan tersebut antara lain : pengelolaan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan daerah, ijin rumah sakit tipe C dan D, penerbitan izin praktik dan ijin kerja ternaha kesehatan, pengelolaan SDM kesehatan daerah, izin usaha yang berkaitan dengan penyediaan pbat dan alat kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Sayangnya belum semua daerah mengoptimalkan peluang ini. Pembangunan sistem kesehatan daerah cenderung bersifat parsial dan stagnan , regulasi SKN

⁸¹ Dona Budi Kharisma. 2018. "SISTEM KESEHATAN DAERAH : ISU DAN TANTANGAN BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA". RechtsVinding Online

membuka ruang bagi daerah untuk mengatur manajemen mekanisme konflik antara penyedia layanan kesehatan dan penerima layanan juga belum banyak diterapkan. Belum semua daerah membangun sistem kesehatan daerah yang terpadu dan komprehensif⁸².

Pemerintah Pusat, perlu mengintervensi pemerintah daerah untuk membangun sistem kesehatan daerahnya dengan lebih optimal. Keberadaan sistem kesehatan daerah dapat dijadikan pedoman baik bagi pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, pihak swasta dan masyarakat untuk bersama-sama bersinergi mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat daerah dan selaras dengan sistem kesehatan nasional.

Menyikapi kondisi geografis Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak, pemerintah juga harus mulai berfikir membangun sistem *e-Health* atau sistem kesehatan elektronik sebagaimana negara-negara maju. Sistem kesehatan elektronik secara sederhana dapat diartikan sebagai praktek pelayanan kesehatan yang menghubungkan berbagai komponen tidak hanya sebatas dokter dan pasien tetapi juga antara perawat, farmasi, fasilitas pelayanan kesehatan⁸³. Sistem *e-health* yang dapat dengan mudah digunakan melalui *smart phone* akan menekan *out of pocket* yang dikeluarkan oleh masyarakat. *E-health* menjadi solusi atas tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks yang dihadapkan dengan keterbatasan biaya atau anggaran, kondisi geografis Indonesia, dan jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Penguatan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan *output* dari kesehatan semesta dan memperkuat penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Sehingga semua masyarakat di Indonesia mampu mengakses pelayanan kesehatan dengan adil, bermutu dan terjangkau. Tujuan dari penyelenggaraan sistem kesehatan nasional yaitu terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya akan tercapai.

16. Penguatan Pembangunan Pendidikan Untuk Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia Berwawasan Kebangsaan

⁸² Ibid.

⁸³ Abdillah Azis, Kamal Burhanuddin, Dian Budi Santoso. 2017. "OPPORTUNITIES AND BARRIERS THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL HEALTH APPLICATIONS IN INDONESIA". Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia Vol. 5 No.2 Oktober 2017

Pendidikan menurut Soekanto didefinisikan sebagai alat membina dan mendorong seseorang untuk berfikir secara rasional maupun logis melalui penyerapan pengalaman, keahlian dan ketrampilan dalam menyikapi gejala-gejala sosial yang terjadi⁸⁴. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dalam mengembangkan pribadinya, memperoleh pendidikan dan mencerdaskan dirinya. Melalui pendidikan seseorang dapat membebaskan dirinya dari kebodohan dan keterbelakangan, berpartisipasi dalam proses politik dan memiliki kemampuan membebaskan diri dari kemiskinan⁸⁵. Pendidikan menjadi sarana mobilitas vertikal yang paling penting, dengan pendidikan seseorang memperoleh kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih layak dan baik.

Permasalahan pendidikan dan karakter bangsa di Indonesia semakin kompleks sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Masa pandemi covid-19 dimana proses belajar mengajar dilakukan secara online dengan keberagaman kemampuan guru dan siswa juga berpotensi menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Era globalisasi dimana negara-negara seakan-akan tidak memiliki batas dan mudahnya ideologi serta budaya negara lain masuk ke Indonesia tanpa diimbangi penguatan implementasi Pancasila berpotensi mendegradasi karakter SDM Indonesia.

Permasalahan pendidikan di Indonesia masih dihadapkan dengan tingginya Angka Tidak Sekolah (ATS), rendahnya partisipasi pendidikan, kesenjangan kualitas pendidikan karena adanya ketimpangan sarana prasarana pendidikan dan pengajar di Indonesia. Sedangkan pada karakter SDM masih dihadapkan dengan disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga meningkatkan kualitas SDM sehingga daya saing SDM dan

⁸⁴ -.-. "Pendidikan". <http://repository.uin-suska.ac.id/4112/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 14 Mei 2021.

⁸⁵ Iwan Koswara.2018. "Revitalisasi Pembangunan Pendidikan Melalui Pendekatan Komunikasi Pendidikan". Jurnal Agregasi. Volume 6. Nomor 1. Hal 36 – 59.

bangsa meningkat. Pembangunan pendidikan meliputi aspek intelektual dan karakter peserta didik.

Berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 visi dari Kementerian Pendidikan adalah “terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”⁸⁶. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) juga menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Untuk mewujudkan visi tersebut, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, meningkatkan produktivitas dan daya saing, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Visi tersebut secara umum dapat dibagi menjadi dua arah yaitu untuk pembangunan intelektual peserta didik dan karakter peserta didik.

a. Pendidikan Intelektual

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kecerdasan. Kecerdasan diperlukan peserta didik agar mampu berpikir kreatif dan inovatif. Pembangunan pendidikan intelektual tertuang dalam arah ke-1 dan ke-2 kebijakan pembangunan pendidikan.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan pertama, yaitu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dilakukan melalui (1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (2) peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (3) peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; (4) penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah; (5) peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan. **Arah kebijakan pembangunan pendidikan kedua**, yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing dilakukan melalui (1)

⁸⁶ Kementerian Pendidikan. 2020. “Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 – 2024”. Jakarta : Kementerian Pendidikan. Hal. 32

pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; (2) penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas⁸⁷.

b. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan penanaman nilai, waktu, perilaku yang diharapkan dapat berkembang sehingga penerima pendidikan karakter seperti peserta didik ataupun mahasiswa mampu mengambil keputusan yang baik untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya⁸⁸. Tujuan pendidikan dalam UU Sisdiknas antara lain mengembangkan potensi kepribadian, dan akhlak mulia. Sehingga pendidikan membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter, berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan agama.

Permasalahan SDM khususnya peserta didik adalah disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arah ke-3 kebijakan pembangunan pendidikan ditujukan untuk mengatasi hal tersebut. **Arah kebijakan pembangunan pendidikan ketiga**, yaitu revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila dilakukan melalui (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; (3) pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme⁸⁹. Arah kebijakan mental dapat dilihat pada gambar 3 lampiran 3.

Ketiga arah kebijakan pembangunan pendidikan tersebut diwujudkan dalam program merdeka belajar. Program merdeka belajar adalah upaya menghadirkan pendidikan bermutu bagi semua rakyat Indonesia dengan ciri (1) angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan; (2) hasil pembelajaran berkualitas; (3) mutu pendidikan merata secara geografis, status sosial dan ekonomi yang memadai. Pendidikan tersebut juga difokuskan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa dengan pelestarian budaya bangsa dan penyerapan nilai baru

⁸⁷ Ibid. Hal. 40.

⁸⁸ Muhammad Zaki Ahadiat. 2020. "Perencanaan, Pelaksanaan Dan Evaluasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (Sikk) Sabah, Malaysia". Skripsi Jurusan Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang

⁸⁹ Kementerian Pendidikan.Op.cit. Hal. 40

dari luar yang produktif dan positif. Kebijakan merdeka belajar bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi guru dan peserta didik dalam pembelajaran termasuk evaluasi. Ilustrasi program merdeka belajar dapat dilihat pada gambar 4 lampiran 3.

Era revolusi industri 4.0 dan terjadinya pandemi covid-19 menuntut penguasaan teknologi dan komunikasi. Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat dan *internet of things* dalam setiap bidang kehidupan manusia. Di bidang pendidikan, kurikulum pendidikan idealnya diarahkan pada (1) *critical thinking*; (2) *Creativity and innovation*; (3) *Interpersonal skill and communication*; (4) *Teamwork and collaboration*; (5) *Confident*⁹⁰. Era revolusi industri 4.0, juga menjadikan internet sebagai sarana penting dalam proses pembelajaran, sejak tahun 2017 literasi digital masuk menjadi salah satu literasi di Indonesia, dimana tidak hanya kemampuan membaca tetapi juga peningkatan kemampuan menganalisa dan menggunakan informasi digital⁹¹. Tanpa penguasaan teknologi dan komunikasi, SDM Indonesia akan tertinggal karena saat ini semua serba terkoneksi, internet menjadi kebutuhan sehari-hari.

Implementasi arah kebijakan pembangunan pendidikan oleh pemerintah, masih didapati beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain :

- a. Program merdeka belajar belum diimbangi dengan menyiapkan kesiapan guru dan dosen. Sebagaimana diketahui dalam program merdeka belajar guru dan dosen menjadi ujung tombak untuk terciptanya metode pembelajaran yang memberikan kenyamanan untuk guru/ dosen dengan peserta didik. Di Indonesia masih dijumpai ketimpangan kualitas guru/ dosen yang berpotensi menghambat implementasi program merdeka belajar⁹².
- b. Masih terjadinya kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, terutama antara Pulau Jawa dan wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Termasuk didalamnya kesenjangan akses

⁹⁰ Faulinda Ely Nastii dan Aghni Rizqi Ni'mal 'Abdu. 2020. "Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi era society 5.0". Edcomtech Volume 5, No 1. Hal 61- 66.

⁹¹ Ibid

⁹² CNN Indonesia. 2020. "Pengamat Kiritisi Kebijakan 'Gimik' Kampus Merdeka ala Nadiem". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200131070707-20-470343/pengamat-kiritisi-kebijakan-gimik-kampus-merdeka-ala-nadiem> diakses pada 15 Mei 2021.

internet, dimana internet menjadi kebutuhan masyarakat di era revolusi industri 4.0 termasuk dalam bidang pendidikan. Pada masa pandemic covid-19, kurang lebih sebanyak 45,3 juta pelajar dan 8 juta mahasiswa terdampak yang memaksa pembelajaran di berlakukan secara *online*. Kendala dalam pembelajaran online adalah kesenjangan digital yang disebabkan oleh tingkat partisipasi digital, jaringan internet, kemampuan menggunakan teknologi informasi dan kepemilikan alat⁹³.

- c. Pendidikan karakter di Indonesia yang salah satunya diimplementasikan dalam gerakan revolusi mental belum berhasil. Revolusi mental seakan-akan hanya jargon. Kekerasan juga terus terjadi di dunia pendidikan. Pada tahun 2019, KPAI mencatat 125 kasus kekerasan di dunia pendidikan⁹⁴. Selain itu, penilaian pendidikan karakter terhadap peserta didik sulit untuk dilaksanakan, karena keterbatasan kapasitas guru atas panduan pelaksanaan pendidikan karakter dan umumnya penilaian pendidikan karakter hanya didasarkan pada observasi sesaat dan catatan atas pelanggaran tata tertib sekolah⁹⁵.
- d. Masih rendahnya kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Pada *QS World University Ranking* tahun 2019, dimana universitas unggulan Indonesia yaitu Universitas Indonesia berada di peringkat 296 kalah dari negara-negara lain seperti Tiongkok dan Hongkong⁹⁶. Output perguruan tinggi saat ini belum mampu menjawab kebutuhan dunia industri yang diharapkan dapat menekan angka pengangguran. Perguruan tinggi harus terus meningkatkan kapasitasnya dan menyesuaikan diri dengan era revolusi industri 4.0, sehingga keluaran dari perguruan tinggi akan terserap dan menjawab kebutuhan dunia industri.

⁹³ Anesthesia Novianda. 2020. "Menjembatani Kesenjangan Digital dalam Pendidikan". <https://news.detik.com/kolom/d-5087800/menjembatani-kesenjangan-digital-dalam-pendidikan> diakses pada 16 Mei 2021.

⁹⁴ Muhammad Rafliyanto. 2020. "Pendidikan Karakter Indonesia Belum Berkarakter". <https://ibtimes.id/pendidikan-karakter-indonesia-itu-belum-berkarakter/> diakses pada 15 Mei 2021.

⁹⁵ Cicilia Salaisek. 2019. "Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Penilaian Dan Hambatan-Hambatannya Pada 10 SMP di Indonesia". Skripsi Prodi Bimbingan dan Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

⁹⁶ Tim Pikiran Rakyat. 2019. "Peringkat Perguruan Tinggi Indonesia Tertinggal Jauh". <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01316601/peringkat-perguruan-tinggi-indonesia-tertinggal-jauh> diakses pada 15 Mei 2021.

- e. Pengelolaan anggaran pendidikan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 % dan anggaran pendidikan terus meningkat setiap tahunnya. Alokasi tersebut merupakan amanat UUD Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, baik melalui intervensi APBN ataupun APBD. Jumlah anggaran pendidikan pada tahun 2021 sebesar 549,5 triliun rupiah. Sejak tahun 2009, alokasi anggaran pendidikan sudah mencapai 20 %, dan saat ini merupakan porsi terbesar belanja pemerintah⁹⁷. Alokasi anggaran minimal sebesar 20 % merupakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mewujudkan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi bagi semua warga negaranya sebagaimana amanat UU Sisdiknas. Besarnya anggaran tersebut, ternyata belum diimbangi dengan tingkat pengelolaan yang efektif, efisien dan akuntabel. Sehingga output yang dihasilkan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan. Seperti pada tahun 2017, dimana angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD 0.38 %, SMP sebesar 91 % dimana peningkatan alokasi anggaran untuk indikator tersebut mencapai 9,52 %⁹⁸. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan Indonesia belum sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional dimana terjadi peningkatan signifikan Dana Alokasi Khusus Fisik pembangunan dan perbaikan prasarana fisik di Bidang Pendidikan⁹⁹. Anggaran pendidikan juga banyak diselewengkan. Data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa pada tahun 2005 – 2016 setidaknya terjadi 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan dengan total kerugian negara mencapai 1,3 triliun rupiah dan nilai suap 44 milyar rupiah¹⁰⁰.

⁹⁷ Fransina Natalia Mahudin. 2019. "Satu Dekade Anggaran Pendidikan 20 Persen".

<https://indonews.id/artikel/21928/Satu-Dekade-Anggaran-Pendidikan-20-Persen/#:~:text=Jakarta%2C%20INDONEWS.ID%20%2D%2D%20UUD,atau%20Anggaran%20Pendapatan%20Belanja%20Daerah> diakses pada 15 Mei 2021.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Marthunis. 2019. "Gawat Darurat Korupsi Dana Pendidikan".

<https://mediaindonesia.com/opini/220609/gawat-darurat-korupsi-dana-pendidikan> diakses pada 2 Mei 2021.

Pada distribusi anggaran pendidikan, anggaran pendidikan terdistribusi pada 20 kementerian yaitu Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BTNN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan yang belum diimbangi dengan sinergitas, dan monitoring evaluasi anggaran yang mumpuni¹⁰¹. Pada tahun 2021, Kementerian pendidikan hanya mendapatkan anggaran 81,5 triliun dari anggaran sebesar 550 triliun rupiah¹⁰². Banyaknya anggaran yang terdistribusi di 20 kementerian dengan minimnya sinergitas, monitoring, evaluasi berpotensi terjadinya *double* anggaran ataupun adanya program yang tidak teranggarkan, dan program yang tidak saling mendukung antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.

Pemerintah harus segera berbenah mengatasi kelemahan-kelemahan pada pembangunan pendidikan di Indonesia, karena pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mengakselerasi kualitas dan daya saing SDM. Dalam upaya penguatan pembangunan pendidikan, Pemerintah dapat mengadopsi teori *Total Quality Management* (TQM) atau Manajemen Peningkatan Mutu (MPM). MPM merupakan filosofi perbaikan berkelanjutan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan disaat ini dan dimasa yang akan datang¹⁰³. Dalam hal pendidikan, pelanggan disini adalah masyarakat Indonesia

¹⁰¹ Humas Setkab. 2018. "APBN 2018: Total Anggaran Pendidikan Rp444,131 Triliun, Terbanyak di Kemenag Rp52,681 Triliun". <https://setkab.go.id/apbn-2018-total-anggaran-pendidikan-rp444131-triliun-terbanyak-di-kemenag-rp52681-triliun/> diakses pada 2 Mei 2021.

¹⁰² Fahdi Fahlevi. 2021. "Anggaran Pendidikan 2021 Capai Rp550 Triliun, Kemendikbud Dapat Rp 81,5 Triliun". <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/05/anggaran-pendidikan-2021-capai-rp550-triliun-kemendikbud-dapat-rp-815-triliun/>. Di akses pada 2 Mei 2021.

¹⁰³ Edward Sallis diterjemahkan oleh ahmad ali riyadi & Fahrurrozi. 2015. "Total Quality Management in Education. Terjemahan". Yogyakarta : IRCiSoD. Hlm. 62

khususnya peserta didik, dimana sesuai dengan UU Sisdiknas pasal 11 ayat 1 adalah negara dituntut memberikan akses pendidikan yang mudah, bermutu, dan tanpa diskriminasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat 7 prinsip dalam MPM yang dapat diadopsi dalam penguatan pembangunan pendidikan di Indonesia, yaitu :

- a. Tanggung jawab untuk manajemen puncak (Top Management). Disini, manajemen adalah Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Pusat dan daerah harus terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan partisipasi sekolah, menekan ATS, serta pemerataan kualitas, sarana prasarana, pengajar di Indonesia agar ketimpangan di dunia pendidikan dapat diatasi. Tanggung jawab pemerintah juga diwujudkan dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dalam pengelolaan anggaran melalui sinergitas antar lembaga, penguatan monitoring evaluasi penggunaan anggaran, agar anggaran yang tersedia dapat menghasilkan output yang optimal.

Kebijakan desentralisasi pendidikan dimana berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah terkait kurikulum, manajemen pendidikan, akreditasi, bahasa dan sastra, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih memajukan pendidikan di daerah. Pengelolaan jenjang pendidikan SMA sederajat dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi juga dapat mengatasi kesenjangan pendidikan antar Kabupaten/ Kota. Hal ini juga mendukung terwujudnya program wajib belajar 12 tahun.

- b. Mutu harus difokuskan kepada konsumen dan evaluasinya harus berbasis konsumen. Evaluasi dalam pembangunan pendidikan di Indonesia didasarkan dan diarahkan pada tujuan pendidikan dalam Sisdiknas yaitu akses pendidikan yang mudah, bermutu, dan tanpa diskriminasi.
- c. Design proses produksi dan metode kerja harus jelas untuk mencapai kesesuaian mutu produk (*conformance quality product*). Pemerintah juga harus terus meningkatkan kualitas kurikulum baik pendidikan intelektual ataupun karakter serta metode evaluasinya untuk

menjawab kebutuhan di era revolusi industri 4.0 dan menyikapi terdegradasinya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

- d. Setiap lembaga bertanggung jawab atas tercapainya mutu produk yang baik.

Lembaga disini adalah sekolah, mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, serta 20 Kementerian di Pusat dan Dinas Pendidikan di daerah harus selalu meningkatkan kapasitasnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Diharapkan dengan hal ini output dari pendidikan disetiap jenjangnya berkualitas dan menjawab tantangan di dunia industri di era revolusi industry 4.0.

Pada perguruan tinggi diperlukan penguatan paradigma Tri Dharma perguruan tinggi yang selaras dengan industri 4.0. Tri Dharma perguruan tinggi terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat dan 3 (tiga) literasi baru di era revolusi industry 4.0 adalah digital, teknologi dan *human*. Kemampuan manajemen melalui kewajiban *entrepreneurship* dan *internship* diharapkan melengkapi kemampuan mahasiswa. Perguruan Tinggi menjadi sarana pembelajaran sepanjang hayat dimana terjadi reskilling dan upskilling serta perlunya internasionalisasi dan konektivitas dengan tetap membangun karakter SDM.

- e. Mutu tidak boleh dinilai setelah menjadi barang jadi, tetapi sejak awal (sejak menjadi komponen).

Hal ini dapat dijadikan prinsip dalam penilaian pendidikan karakter, dimana hasil akhir pendidikan tidak hanya dilihat dari aspek akademis tetapi juga proses untuk memperolehnya. Selain itu dalam menilai mutu pendidikan di Indonesia dapat dimulai dari komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

- f. Organisasi harus berusaha keras (*strive*) melaksanakan perbaikan mutu produk secara terus-menerus. Perencanaan pembangunan pendidikan harus berkelanjutan sesuai dengan rancangan pembangunan jangka panjang yang telah disusun. Selain itu diperlukan, peningkatan integritas dan komitmen pemerintah pusat dan daerah serta semua unsur yang terlibat untuk melaksanakan pembangunan pendidikan dengan sebaik-

baiknya dengan mengesampingkan ego sektoral dan berorientasi pada tujuan nasional bangsa Indonesia. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga dan menekan penyimpangan anggaran pendidikan.

g. Lembaga harus bekerjasama untuk melaksanakan MPM.

Pemerintah melalui sekolah harus menjalin kerjasama dengan orang tua, pendidikan tanpa dukungan orang tua hasilnya tidak akan optimal. Karena keluarga dan lingkungannya adalah sarana pendidikan termasuk pendidikan karakter. Selain itu Pemerintah harus menjalin kerjasama dengan dunia industri agar output dari lembaga pendidikan menjawab kebutuhan industri. Hal ini sudah dilaksanakan Pemerintah dalam program Merdeka Belajar. Dalam hal mengatasi kesenjangan digital, pemerintah harus terus meningkatkan kerjasama dengan provider penyedia layanan internet untuk mendukung penyediaan akses internet di wilayah Indonesia Timur.

Masa pandemi covid-19, menjadikan permasalahan pendidikan semakin kompleks. Di masa pandemi covid-19, pembangunan pendidikan juga harus dapat membangun kesehatan mental peserta didik. Pembelajaran dengan sistem jarak jauh atau yang dikenal PJJ dan sulitnya kondisi perekonomian masyarakat saat ini serta peningkatan kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesehatan mental peserta didik. Guna membangun kesehatan mental peserta didik, pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan kurikulum *social and emotional learning* (sel). Kurikulum SEL adalah kurikulum dimana membuka ruang bagi peserta didik untuk dapat mengenal emosinya, kepedulian terhadap orang lain, pembuatan keputusan yang baik, berperilaku baik, mengembangkan relasi yang baik dengan sesama dan menghindari perilaku negatif¹⁰⁴. Kurikulum SEL menekankan pembelajaran yang berkaitan dengan 5 komponen yaitu *self awareness, self manangement, responsible decision making, social awareness, dan relationship skills*. Kurikulum SEL sudah banyak diterapkan di negara- negara maju seperti Amerika dan Australia. Penerapan kurikulum SEL dapat dilakukan dengan mengubah metode pembelajaran yang lebih mendekati peserta didik

¹⁰⁴ Rozi Sastra Purna. 2016. "PENGEMBANGAN SOCIAL EMOTIONAL LEARNING(SEL) DI SEKOLAH". Prosiding Inovasi Pendidikan Di Era Big Data Dan Aspek Psikologinya

untuk dapat mengenali emosi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk mendorong dialog antar peserta didik, pemahaman lintas budaya, solusi permasalahan dan pengambilan keputusan terkait isu sosial dan emosional di lingkungan sekitar¹⁰⁵.

Penerapan kurikulum SEL di Indonesia akan sangat relevan dalam mendukung SDM yang berwawasan kebangsaan. Artinya 5 komponen dalam kurikulum sel yang meliputi *self awareness*, *self manangement*, *responsible decision making*, *social awareness*, dan *relationship skills* diarahkan sesuai dengan nilai- nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, toleransi, keadilan, kemanusiaan dan lain- lain. Hal ini menjadi solusi atas stagnasinya program revolusi mental di Indonesia. Sehingga selain peserta didik memiliki kemampuan yang mumpuni pada aspek intelektual juga memiliki karakter yang sesuai dengan nilai – nilai luhur Pancasila dalam mengelola mental dan bersosialisasi dengan lingkungannya.

Penguatan pembangunan pendidikan melalui MPM termasuk adopsi kurikulum SEL diharapkan dapat mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia baik dari segi mutu, kemudahan akses, keadilan. Pembangunan pendidikan menjadi sarana meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Pendidikan dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana tercantum dalam UU no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kapasitas dan membentuk watak serta membangun peradaban bangsa bermartabat dan sesuai dengan nilai- nilai kepribadian bangsa.

17. Penguatan Pembangunan IPTEK Guna Penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan IPTEK dalam kerangka pembangunan SDM menjadi salah satu pendukung misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pembangunan iptek di Indonesia sesuai dengan RPJPN tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas iptek berpedoman pada nilai luhur budaya bangsa dan agama untuk menghasilkan, memanfaatkan teknologi hasil penelitian,

¹⁰⁵ Rozi Sastra Purna. Op.cit.

mengembangkan dan merekayasanya bagi kesejahteraan, kemandirian dan daya saing bangsa¹⁰⁶. Dari arah pembangunan iptek dapat diketahui bahwa penguasaan iptek oleh SDM melalui riset/ penelitian yang didalamnya terdapat inovasi diharapkan menghasilkan teknologi yang dapat diaplikasikan sehingga mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Pembangunan IPTEK di Indonesia belum optimal. Hal ini dikarenakan rendahnya inovasi di Indonesia berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran, jumlah paten, publikasi sains dan teknik di tingkat global, keterbatasan infrastruktur litbang, kualitas SDM Iptek masih rendah, ekosistem inovasi di Indonesia masih rendah, sinergi *triple helix* masih rendah dan hasil riset dan inovasi perguruan tinggi belum menjawab kebutuhan dunia industri. Contoh nyata rendahnya inovasi iptek dapat dilihat pada ketergantungan produk impor alat kesehatan atau komponennya yang masih tinggi. Selama ini kita masih menjadi pengguna teknologi di bidang kesehatan dikarenakan minimnya dorongan riset dan inovasi, tingkat impor alat kesehatan mencapai 90 %¹⁰⁷.

Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan pembangunan inovasi iptek. Upaya tersebut meliputi penyusunan Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan, Pengembangan *Research Power-House*, Penciptaan ekosistem inovasi, Peningkatan kualitas belanja litbang melalui koordinasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penyusunan Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 bertujuan untuk menghasilkan produk riset dan produk inovasi strategis. Pengembangan *Research Power-House* mencakup peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM Iptek, pengembangan dan penguatan infrastruktur litbang strategis, penguatan Pusat Unggulan Iptek, pengelolaan data kekayaan hayati dan kekayaan intelektual, serta pengembangan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri. Penciptaan ekosistem inovasi yang mencakup penguatan kerja sama *triple-helix*, perbaikan tata kelola paten/KI, Manajemen Inovasi di perguruan tinggi, pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT). Peningkatan

¹⁰⁶ Daryatmo Mardiyanto. 2017. "Penguatan Landasan Hukum Untuk Terciptanya Sistem Inovasi Nasional Untuk Daya Saing Dan Kemandirian Nasional". Disampaikan Dalam Seminar Nasional Di Jakarta Tanggal 23 November 2017.

¹⁰⁷ Annisa' Nahdah Hidayaturrahmah. -. "Analisis Dampak dari Revolusi Industri 4.0 di Bidang Kesehatan". <https://osf.io/bzfu7/download/?format=pdf> diakses pada 2 Mei 2021

kualitas belanja litbang melalui koordinasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang ditunjang oleh peningkatan belanja litbang dari hasil pengembangan Dana Abadi Penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi, penguatan pendataan dan fasilitasi pendanaan alternatif dari luar pemerintah, serta pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi.¹⁰⁸

Pembangunan iptek di Indonesia saat ini belumlah optimal, hal ini disebabkan oleh :

- a. Kurangnya sinergi kebijakan pembangunan iptek dengan kebijakan lain. Sebagai contoh, UU Cipta Kerja sektor ketenagakerjaan saat ini memperkecil peluang terjadinya transfer ilmu dan teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia. Hal ini tidak selaras dengan pembangunan ekosistem iptek yang dilakukan oleh Pemerintah.
- b. Pembubaran Kemenristek dan meleburkannya ke Kemendikbud serta membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai badan otonom yang berpotensi memperlambat riset dan inovasi di Indonesia. BRIN sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memiliki tupoksi mengintegrasikan semua lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) serta penelitian dan pengembangan di kementerian atau lembaga ke dalam BRIN. Integrasi tersebut membutuhkan waktu yang lama dan berpotensi menghambat koordinasi dan komunikasi riset dan inovasi selama proses integrasi tersebut¹⁰⁹.
- c. Fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa seringkali riset hanya sekedar jadi sarana penyerapan anggaran. Birokrasi membuat orientasi riset sebatas kegiatan, bukan bertujuan menghasilkan inovasi dan teknologi baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan keunggulan bersaing¹¹⁰.

¹⁰⁸ Inspektorat Utama Kemenristek/BRIN. 2020. "Rencana Strategis Periode 2020-2024 Inspektorat Utama Kemenristek/BRIN". Jakarta : BRIN.

¹⁰⁹ Asa. 2021. "Mantan Deputi KSP Kritik Keras Merger Kemristek-Kemdikbud". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210410110101-20-628194/mantan-deputi-ksp-kritik-keras-merger-kemristek-kemdikbud> diakses pada 3 Mei 2021.

¹¹⁰ Bernarda Rurit dan Nugroho Dewanto.Op.cit. Hal 46

Permasalahan pembangunan iptek harus segera ditangani. Dalam upaya penguatan pembangunan iptek untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat menggunakan **teori model spiral oleh Mireille Merx dan Nijhof** dimana penguasaan iptek akan menciptakan pengetahuan baru dan menghasilkan inovasi, selanjutnya inovasi yang sudah ada tersebut menjadi pembelajaran baru untuk inovasi selanjutnya. Demikian siklus tersebut terus berulang dalam lingkup organisasi, yang didukung dengan ekosistem iptek sehingga menghasilkan keunggulan bersaing dan keunggulan ekonomi.¹¹¹ Berdasarkan teori tersebut penguatan yang dapat dilakukan adalah :

- a. Membangun ekosistem iptek untuk mendukung pembangunan iptek di Indonesia seperti evaluasi kebijakan iptek dengan kebijakan lainnya agar sinergi dalam mendukung pembangunan iptek, mengubah mindset organisasi dalam melaksanakan riset agar selaras dengan arah pembangunan iptek dan tujuan nasional bangsa. Pembangunan ekosistem iptek di daerah dapat dioptimalkan dengan adanya regulasi terkait sistem inovasi daerah. Sistem inovasi daerah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- b. Mendorong BRIN sebagai organisasi / lembaga yang memfasilitasi pembangunan iptek, untuk segera beradaptasi dan melaksanakan tupoksinya dalam mengintegrasikan lembaga penelitian baik dari kementerian dan non kementerian.
- c. Pembangunan iptek secara berkelanjutan untuk mendukung siklus inovasi melalui peningkatan dukungan anggaran dan pengembangan *research power-house*.

Penguatan pembangunan iptek tersebut diharapkan dapat meningkatkan keunggulan bersaing dan ekonomi serta memberikan sumbangsih nyata terhadap dunia industri. Pandemi covid-19 berdampak sangat dalam terhadap perekonomian Indonesia, UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak covid-

¹¹¹ Budi Hermana. -. "Mendorong Daya Saing di Era Informasi dan Globalisasi: Pemanfaatan Modal Intelektual dan Teknologi Informasi sebagai Basis Inovasi di Perusahaan". <http://bhermana.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/10029/Daya+Saing+dan+Globalisasi.pdf> diakses pada 3 Mei 2021.

19. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan 50 % UMKM di Indonesia bangkrut akibat pandemi¹¹². Hasil survey yang dilakukan oleh Katadata Insight Center terhadap UMKM di Jabodatabek menyebutkan sebanyak 58,6 % UMKM di Indonesia di masa pandemi berada dalam kondisi buruk, 82,9 % UMKM mengalami dampak buruk, dan 63,9 % UMKM mengalami penurunan omset diatas 30 %¹¹³. Pembangunan iptek dapat memainkan perannya disini, yaitu mendukung adopsi iptek dalam hal untuk mendukung UMKM bangkit dan berkembang di masa pandemi.

Guna mendukung adopsi iptek bagi UMKM, pembangunan iptek dapat di tujuan untuk penciptaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dari UMKM sehingga inovasi teknologi yang dihasilkan tersebut bersifat tepat guna. Untuk dapat memenuhi kriteria adopsi iptek yang tepat guna dapat dilakukan dengan mengadopsi teori *Technology to Performance Chain* oleh Goodhue and Thompson. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa adopsi teknologi yang tepat guna idealnya memenuhi *Task Technology Fit (TTF)* atau kecocokan teknologi kerja, yaitu sebuah kondisi dimana teknologi yang diadopsi fitur dan fungsinya haruslah sesuai dengan kebutuhan tugas, kemampuan SDM UMKM¹¹⁴. Dengan kondisi tersebut adopsi iptek pada UMKM akan menjadi *usefull* dan berdampak pada penambahan nilai tambah atau daya saing UMKM. Pembangunan iptek yang ditujukan pada sektor UMKM juga mendukung percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi dimana UMKM mempunyai kontribusi besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 61,06 %¹¹⁵. Tumbuhnya UMKM yang sehat di Indonesia juga menjadi solusi kemiskinan di Indonesia, apalagi di masa pandemi dimana kemiskinan meningkat akibat banyaknya pengurangan ataupun pemutusan hubungan kerja. Sebagai gambaran, UMKM di Indonesia merupakan sektor usaha yang menyerap tenaga kerja di Indonesia mencapai 97 %. Hal ini juga akan meningkatkan kontribusi iptek terhadap perekonomian bangsa.

¹¹² Fiona. 2020. "Benarkah UMKM Lebih Bisa Bertahan di Tengah Krisis?". Benarkah UMKM Lebih Bisa Bertahan di Tengah Krisis? | Qasir.id diakses pada 16 Agustus 2021.

¹¹³ KataData. 2020. "DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM". <https://katadata.co.id/umkm> diakses pada 17 Agustus 2021.

¹¹⁴ Margo Purnomo. 2011. "ADOPSI TEKNOLOGI OLEH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH". Jurnal Dinamika Manajemen Vol. 2, No. 2, 2011, pp: 109-117

¹¹⁵ Haryo Limanseto. 2021. "UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia". [UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia](#) diakses pada 17 Agustus 2021.

Kontribusi iptek terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini hanya mencapai 1 %.¹¹⁶ .

Penguatan pembangunan iptek yang meningkatkan keunggulan bersaing dan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sebagaimana tujuan pembangunan iptek yang tercantum dalam pasal 3 UU No 11 Tahun 2019 yaitu meningkatkan kualitas, kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing bangsa. Melalui pembangunan iptek, SDM mampu mengelola semua potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa.

18. Hubungan antara Pembangunan SDM dan Daya Saing Bangsa di Era Revolusi Industri 4.0.

Pembangunan SDM memiliki keterkaitan erat dengan daya saing bangsa. Di era revolusi industri 4.0 dimana teknologi berkembang pesat, semua serba terkoneksi dengan internet dan menguatnya dominasi otomatisasi menuntut SDM yang berkualitas dan berdaya saing. SDM yang berkualitas dan berdaya saing membutuhkan kesehatan, pendidikan, karakter / wawasan kebangsaan dan dukungan penguasaan iptek yang cukup. Hal ini sebagaimana teori Human Capital oleh Todaro yang menyebutkan bahwa human capital dapat diukur dari derajat pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi pendidikan SDM semakin meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya. Pendidikan memiliki keterkaitan dengan kesehatan. Tanpa kesehatan, kemampuan dan ketrampilan SDM tidak akan menghasilkan produktivitas¹¹⁷ . Dari teori human capital dapat dikatakan semakin berhasil pembangunan kesehatan dan pendidikan di Indonesia, human capital Indonesia akan semakin tinggi dan berkontribusi pada peningkatan capaian HCI dan IPM serta daya saing SDM. Dalam skala luas daya saing SDM akan meningkatkan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0. SDM yang

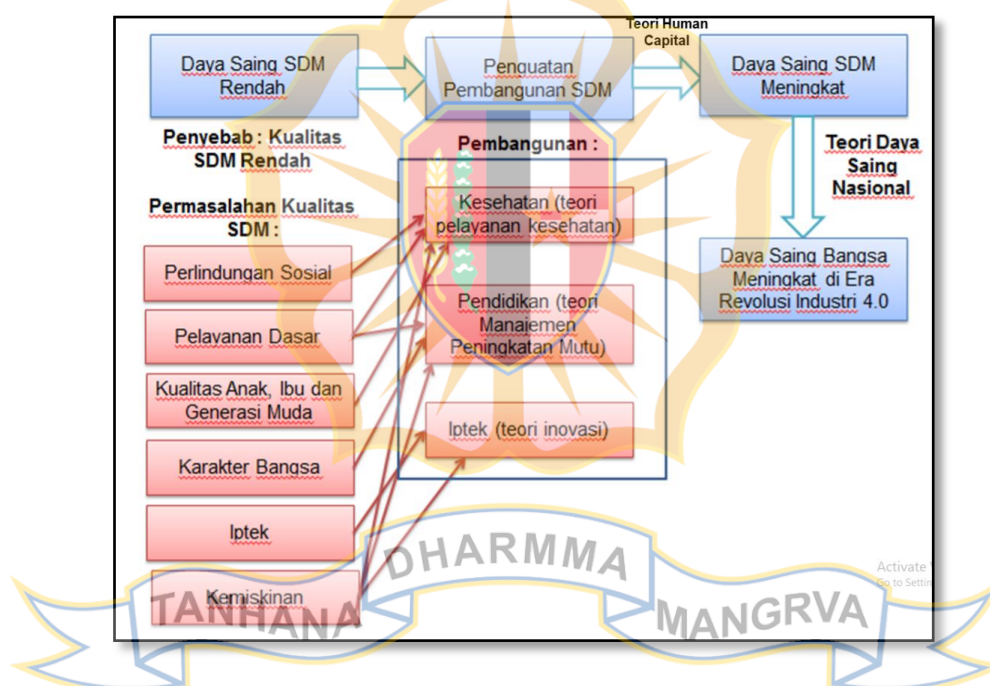
¹¹⁶ Ananda Syaifullah, Op.Cit.

¹¹⁷ Afid Nurkholis. 2018. "Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory". https://www.researchgate.net/publication/326142885_TEORI_PEMBANGUNAN_SUMBERDAYA_MANUSIA_Human_Capital_Theory_Human_Investment_Theory_Human_Development_Theory_Sustainable_Development_Theory_People_Centered_Development_Theory diakses pada 22 Februari 2021.

berkualitas dengan karakter wawasan kebangsaan yang kuat akan mengerahkan semua potensinya untuk mendukung pembangunan nasional. Pembangunan SDM berwawasan kebangsaan hendaknya berjalan bersama dengan usaha pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Masyarakat yang miskin akan sulit untuk mengakses kesehatan dan pendidikan. Kebijakan- kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan harus terus diarahkan untuk mendukung masyarakat miskin mendapatkan kedua pelayanan dasar tersebut.

Secara lebih detail keterkaitan pembangunan SDM berwawasan kebangsaan dan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 6. Keterkaitan Pembangunan SDM Berwawasan Kebangsaan Dan Daya Saing Bangsa Di Era Revolusi Industri 4.0



Sumber : Penulis, 2021.

Teori daya saing nasional oleh Porter dapat digunakan untuk menganalisa hubungan tersebut. Menurut Porter, sifat dari kemakmuran adalah diciptakan, tidak diwarisi. Penguatan daya saing bangsa dapat diarahkan sejalan dengan *The Diamond of National Advantage* oleh Porter¹¹⁸. Porter memetakan terdapat empat atribut dari sebuah bangsa untuk membentuk daya saing nasionalnya, yaitu :

¹¹⁸ Wilson Rajagukguk.2016. "Daya Saing (Competitiveness) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Negara: Studi Kasus Negara Berkembang". Proceeding Maranata Economics & Business Conference 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha

- a. Faktor Kondisi (Factor Conditions). Faktor kondisi meliputi tenaga kerja dan infrastruktur. Pembangunan SDM untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang didalamnya memiliki karakter wawasan kebangsaan merupakan faktor input.
- b. Kondisi Permintaan (Demand Conditions). Pembangunan SDM yang berwawasan kebangsaan akan meningkatkan permintaan pasar dalam negeri karena memiliki konsumen / pelanggan loyal yang cinta akan produk nasional bangsa. SDM yang berpendidikan dengan penguasaan iptek yang handal juga akan menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar global.
- c. Industri yang berhubungan dan mendukung (Related and supporting Industries). Kehadiran industri pendukung dan industri lain akan meningkatkan daya saing bangsa. Pembangunan iptek, selain meningkatkan kualitas dan daya saing SDM juga mampu mendukung keberadaan industri pendukung.
- d. Strategi, Struktur, dan Persaingan (Firm Strategy, Structure, and Rivalry). Berbicara mengenai kebijakan Pemerintah terkait penciptaan dan pengorganisasian perusahaan. Pada atribut ini, pemerintah dituntut menciptakan kebijakan yang mendukung iklim berusaha yang kompetitif.

Pembangunan SDM berwawasan kebangsaan yang didalamnya meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan penguasaan iptek diharapkan menjadi input faktor kondisi, mendukung permintaan dalam negeri serta mendukung keberadaan industri pendukung. Hal ini selanjutnya didukung dengan regulasi berusaha yang kompetitif sehingga membentuk empat atribut dalam *The Diamond of National Advantage*. Pemerintah juga dapat mengoptimalkan kerjasama baik bilateral, multilateral baik di tingkat regional ataupun internasional guna mendukung keberhasilan pembangunan SDM di Indonesia. *The Diamond of National Advantage* diharapkan akan meningkatkan daya saing nasional/bangsa, kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan serta Indonesia memiliki daya tawar di kancah internasional pada era revolusi industri 4.0. Yang disertai dengan peningkatan indikator PISA, *education index*, indeks kesehatan global, IPM, dan HCI.

BAB IV

PENUTUP

19. SIMPULAN

Kualitas SDM erat kaitannya dengan daya saing bangsa. Kualitas SDM Indonesia saat ini masih rendah sehingga berpengaruh pada kualitas daya saing SDM. Daya saing SDM merupakan variabel dependen/ variable yang dipengaruhi oleh kualitas SDM. Rendahnya kualitas SDM Indonesia dapat dilihat dari masih rendahnya capaian indeks kesehatan global, *education index*, PISA, dan semakin terdegradasinya karakter SDM yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Rendahnya kualitas SDM Indonesia disebabkan oleh masih belum optimalnya perlindungan sosial, pelayanan dasar masyarakat, kualitas anak, perempuan dan generasi muda, masih tingginya kemiskinan di Indonesia, masih rendahnya penguasaan iptek, dan semakin terdegradasinya karakter SDM Indonesia. Dalam upaya mengatasi permasalahan SDM di Indonesia, pemerintah melakukan pembangunan SDM. Pembangunan SDM dilakukan melalui pembangunan kesehatan, pendidikan dan iptek.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk menjawab permasalahan pelayanan dasar kesehatan, kualitas anak, ibu dan generasi muda di bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan saat ini difokuskan pada kesehatan semesta melalui 5 strategi yaitu (1) peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; (2) percepatan perbaikan gizi; (3) peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; (4) membudayakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan (5) penguatan sistem kesehatan. Pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari cakupan Program Jaminan Kesehatan (JKN) belum mencapai target UHC yaitu sebesar 95 % penduduk, masih tingginya out of pocket (OOP) Indonesia, perencanaan, penggunaan, dan monitoring evaluasi anggaran kesehatan yang belum optimal. Dalam upaya mengoptimalkan pembangunan kesehatan dapat dilakukan melalui model segitiga pelayanan oleh Albert dan Zamke, yang terdiri dari strategi, sistem dan SDM sehingga menghasilkan pelayanan yang memuaskan *customer/* pelanggan. Implementasinya dapat dilakukan melalui penguatan cakupan jaminan

kesehatan nasional (JKN) dan indeks layanan cakupan UHC, meningkatkan pelayanan promotif dan preventif, meningkatkan sistem perencanaan, penggunaan, dan monitoring evaluasi anggaran kesehatan. Pembangunan kesehatan juga perlu diarahkan untuk membangun sistem kesehatan daerah yang lebih terpadu dan komprehensif sebagai pilar sistem kesehatan nasional. Upaya penguatan pembangunan kesehatan diharapkan dapat mewujudkan pelayanan kesehatan dengan adil, bermutu dan terjangkau.

Pembangunan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mengatasi permasalahan pelayanan dasar pendidikan, kualitas anak, ibu dan generasi muda serta karakter SDM. Visi pembangunan SDM saat ini adalah terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Hal tersebut dilakukan melalui pendidikan intelektual dengan arah meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Untuk pendidikan karakter diarahkan pada revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Pembangunan pendidikan di Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan program merdeka belajar belum diimbangi dengan menyiapkan kesiapan pengajar, masih terjadinya kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, belum berhasilnya gerakan revolusi mental belum berhasil, masih rendahnya kualitas perguruan tinggi di Indonesia dan pengelolaan anggaran pendidikan yang belum optimal. Dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan *Total Quality Management (TQM)* atau Manajemen Peningkatan Mutu (MPM) dengan 7 strategi penguatan komitmen pemerintah baik pusat ataupun daerah; mutu dan evaluasi pendidikan yang diarahkan pada akses pendidikan yang mudah, bermutu, dan tanpa diskriminasi; penguatan kualitas kurikulum pendidikan dan metode evaluasi, tanggungjawab setiap lembaga atas mutu pendidikan, penilaian berdasarkan proses, kerja keras yang berkesinambungan untuk peningkatan mutu dan kerjasama pelaksanaan MPM. Di masa pandemi, pembangunan kesehatan juga harus dapat membangun kesehatan mental peserta didik. Penerapan kurikulum *social and emotional learning* selain memperkuat kesehatan mental juga karakter peserta didik guna menghasilkan SDM yang berwawasan kebangsaan. Upaya

penguatan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu, mudah diakses, berkeadilan sesuai dengan tujuan pendidikan dalam Sisdiknas.

Pembangunan iptek di Indonesia diarahkan untuk mengatasi permasalahan rendahnya penguasaan iptek dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas iptek berpedoman pada nilai luhur budaya bangsa dan agama untuk menghasilkan, memanfaatkan teknologi hasil penelitian, mengembangkan dan merekayasanya bagi kesejahteraan, kemandirian dan daya saing bangsa. Pembangunan iptek di Indonesia saat ini belumlah optimal yang disebabkan oleh kurangnya sinergi kebijakan pembangunan iptek dengan kebijakan lain, pembubaran Kemenristek dan meleburkannya ke Kemendikbud serta membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai badan otonom yang berpotensi memperlambat riset dan inovasi di Indonesia, fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa seringkali riset hanya sekedar jadi sarana penyerapan anggaran. Berdasarkan teori model spiral oleh Mireille Merx dan Nijhof penguatan pembangunan iptek dapat dilakukan melalui penguatan pembangunan ekosistem iptek, mendorong BRIN cepat beradaptasi dan melakukan tupoksinya, dan pembangunan iptek secara berkelanjutan. Regulasi sistem inovasi daerah dapat menjadi peluang memperkuat ekosistem iptek didaerah. Pembangunan iptek yang diarahkan untuk UMKM dengan teknologi yang tepat guna akan mendukung kontribusi iptek dalam perekonomian nasional dan pengentasan kemiskinan. Hal ini diharapkan dapat menjadikan iptek sebagai sarana meningkatkan kualitas, kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing bangsa.

Dengan demikian maka penguatan pembangunan SDM melalui pembangunan kesehatan, pendidikan dan iptek diharapkan dapat membentuk *The Diamond of National Advantage* sehingga akan meningkatkan daya saing nasional/bangsa, kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan, dan Indonesia memiliki daya tawar di kancah internasional pada era revolusi industri 4.0. dimana pembangunan SDM menjadi jalan akselerasi bagi peningkatan daya saing bangsa.

20. REKOMENDASI

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, saran yang diberikan untuk pembangunan SDM berwawasan kebangsaan guna meningkatkan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0 adalah sebagai berikut :

- a. Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menginisiasi penyusunan Peta Jalan atau Roadmap Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Hal tersebut hendaknya dilanjutkan dengan pembuatan rencana aksi nasional pembangunan SDM yang melibatkan berbagai lembaga dengan target yang jelas. Hal ini diharapkan menjadi salah satu sarana koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pembangunan SDM di Indonesia.
- b. Pemerintah perlu segera merumuskan formulasi / strategi pembangunan SDM di masa kedaruratan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Seperti kondisi saat ini dimana pandemi covid-19 berpengaruh pada kualitas SDM dan tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir.
- c. Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini menjadi kompetensi dasar yang dibutuhkan semua SDM Indonesia untuk mampu bersaing di era revolusi industri 4.0. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI perlu mendorong peningkatan literasi TIK, mengingat saat ini Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital dan tingkat kesiapan teknologi masih rendah.
- d. Di bidang kesehatan untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang berpengaruh pada kualitas SDM, Pemerintah perlu melakukan reformasi sistem kesehatan nasional sebagai bentuk kebijakan transformatif. Hal ini dilakukan melalui Kementerian PANRB RI yang berperan dalam pengadaan tenaga kesehatan dan redistribusinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui peyediaan beasiswa bagi calon tenaga kesehatan dan mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten dan dapat langsung terjun dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.A. Mangkunegara. 2001. "Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan". Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Azwar, Azrul. 1994. "Pengantar Administrasi Kesehatan". Tangerang : Binarupa Aksara. Hal. 43.
- Bernarda Rurit dan Nugroho Dewanto. 2020. "SDM Unggul Adalah Koentji Indonesia Menoedjoe 2045". Jakarta : Lemhannas. Hal 320 – 322.
- Edward Sallis diterjemahkan oleh ahmad ali riyadi & Fahrurrozi. 2015. "Total Quality Management in Education. Terjemahan". Yogyakarta : IRCiSoD.
- Eka Afriana dkk. 2020. "Jkn, Out Of Pocket Dan Penduduk Miskin". Jakarta : The Prakarsa.
- Inspektorat Utama Kemenristek/BRIN. 2020. "Rencana Strategis Periode 2020-2024 Inspektorat Utama Kemenristek/BRIN". Jakarta : BRIN.
- Kementerian Kesehatan. 2020. "Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024". Jakarta : Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Pendidikan. 2020. "Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 – 2024". Jakarta : Kementerian Pendidikan.
- Kementerian PPN. 2019. "Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 – 2024". Jakarta : Kementerian PPN
- Tim Bappenas. 2020. "Bedah Anggaran Kesehatan". Jakarta : Bappenas.
- Tim Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa. 2010. " Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010 – 2025". Jakarta : Pemerintah RI.
- Tim Pokja Wawasan Nusantara. 2021. "Bidang Studi Wawasan Nusantara". Jakarta : Lemhannas.

SKRIPSI / TESIS:

Cicilia Salaisek. 2019. "Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Penilaian Dan Hambatan- Hambatannya Pada 10 SMP di Indonesia". Skripsi Prodi Bimbingan dan Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Muhammad Zaki Ahadiat. 2020. "Perencanaan, Pelaksanaan Dan Evaluasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (Sikk) Sabah, Malaysia". Skripsi Jurusan Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang

Rozi Sastra Purna. 2016. "PENGEMBANGAN SOCIAL EMOTIONAL LEARNING(SEL) DI SEKOLAH". Prosiding Inovasi Pendidikan Di Era Big Data Dan Aspek Psikologinya

Wilson Rajagukguk.2016. "Daya Saing (Competitiveness) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Negara: Studi Kasus Negara Berkembang". Proceeding Maranata Economics & Business Conference 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha

JURNAL:

Abdillah Azis, Kamal Burhanuddin, Dian Budi Santoso. 2017. "OPPORTUNITIES AND BARRIERS THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL HEALTH APPLICATIONS IN INDONESIA". Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia Vol. 5 No.2 Oktober 2017

Abdullah Taufik.2015."Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi". Universum. Vol. 9 No. 1

Dana, L.P., L. Korot, and G. Tovstiga .2005." A cross-national comparison of knowledge management practices, International Journal of Manpower. 2005. 26. 1. ABI/INFORM Global.

Dona Budi Kharisma. 2018. "SISTEM KESEHATAN DAERAH : ISU DAN TANTANGAN BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA". RechtsVinding Online

Faulinda Ely Nastii dan Aghni Rizqi Ni'mal 'Abdu. 2020. "Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi era society 5.0". Edcomtech Volume 5, No 1. Hal 61- 66.

- Hamdan. 2018. "Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi". Jurnal Nusamba Vol. 3 No.2 Oktober. Hal. 1 s.d 8.
- Iwan Koswara.2018. "Revitalisasi Pembangunan Pendidikan Melalui Pendekatan Komunikasi Pendidikan". Jurnal Agregasi. Volume 6. Nomor 1.
- Mada Sutapa. 2011. "Daya Saing Organisasi (Bangsa) Dalam Strategi Globalisasi", Jurnal Manajemen Pendidikan. No. 1 Tahun VII. Hal. 1- 8.
- Margo Purnomo. 2011. "ADOPSI TEKNOLOGI OLEH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH". Jurnal Dinamika Manajemen Vol. 2, No. 2, 2011, pp: 109-117
- Mireille Merx, C. and W.J. Nijhof. 2005."Factors influencing knowledge creation and innovation in an organization. Journal of European Industrial Training.2005. 29. 2/3. ABI/INFORM Global. pg. 135.
- Rulyanti Susi Wardhani Dan Yulia Agustina.-. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Daya Saing Pada Sentra Industri Makanan Khas Bangka Di Kota Pangkalpinang". Jurnal Akuntansi Universitas Jember
- Varadina Ayu N. 2016. "Model Pelayanan Kesehatan (Studi Deskriptif Tentang Model Pelayanan Program Antenatal care di Puskesmas Peterongan Kabupaten Jombang)". Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 4, Nomor 3.

SUMBER LAIN DAN INTERNET:

- Daryatmo Mardiyanto. 2017. "Penguatan Landasan Hukum Untuk Terciptanya Sistem Inovasi Nasional Untuk Daya Saing Dan Kemandirian Nasional". Disampaikan Dalam Seminar Nasional Di Jakarta Tanggal 23 November 2017.
- Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.2019."Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia". Disampaikan pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2019.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. "Isu- Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJMN 2020 – 2024". disampaikan dalam Konsultasi Pusat RPJMN 2020- 2014 di Jakarta tanggal 24 Juli 2019.

Subandi Sardjoko.2020. "Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam RPJMN 2020-2024: Menuju Indonesia Maju". Disampaikan di Jakarta tanggal 10 Maret 2020.

-, , "Pengertian Pembangunan", <http://repository.uin-suska.ac.id/4378/3/BAB%202.pdf> diakses pada 22 Maret 2021.

-. "Kualitas Sumber Daya Manusia". https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/754/jbptunikompp-gdl-deranofand-37675-3-unikom_d-i.pdf diakses pada 12 Mei 2021.

-. "Pelayanan Kesehatan". <https://eprints.uny.ac.id/18662/4/4.%20Bab%20II.pdf> diakses pada 5 Juni 2021.

-. "Pendidikan". <http://repository.uin-suska.ac.id/4112/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 14 Mei 2021.

Administrator. 2021. "Riset dan Inovasi Maju, Daya Saing Terpacu". <https://www.indonesia.go.id/kategori/budaya/2535/riset-dan-inovasi-maju-daya-saing-terpacu> diakses pada 2 Mei 2021.

Afid Nurkholis. 2018. "Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory". https://www.researchgate.net/publication/326142885_TEORI_PEMBANGUNAN_SUMBERDAYA_MANUSIA_Human_Capital_Theory_Human_Investment_Theory_Human_Development_Theory_Sustainable_Development_Theory_People_Centered_Development_Theory diakses pada 22 Februari 2021.

Ananda Syaifullah, 2019, "Perbanyak SDM Iptek Demi Menuju Indonesia Maju", http://indonesiabaik.id/motion_grafis/perbanyak-sdm-iptek-demi-menuju-indonesia-maju, diakses pada 22 Februari 2021.

Ananda Syaifullah, 2019, "Perbanyak SDM Iptek Demi Menuju Indonesia Maju", http://indonesiabaik.id/motion_grafis/perbanyak-sdm-iptek-demi-menuju-indonesia-maju, diakses pada 22 Februari 2021.

- Anco. 2018. "Ketimpangan Pendidikan Indonesia Timur dan Barat". <https://sultrakini.com/berita/ketimpangan-pendidikan-indonesia-timur-dan-barat> diakses pada 25 April 2021.
- Anco. 2018. "Ketimpangan Pendidikan Indonesia Timur dan Barat". <https://sultrakini.com/berita/ketimpangan-pendidikan-indonesia-timur-dan-barat> diakses pada 25 April 2021.
- Anesthesia Novianda. 2020. "Menjembatani Kesenjangan Digital dalam Pendidikan". <https://news.detik.com/kolom/d-5087800/menjembatani-kesenjangan-digital-dalam-pendidikan> diakses pada 16 Mei 2021.
- Anindhita Maharrani , Nanang Syaifudin. 2020. "Distribusi tenaga kesehatan tak kunjung merata". <https://lokadata.id/artikel/distribusi-tenaga-kesehatan-tak-kunjung-merata> diakses pada 1 Juni 2021.
- Annisa' Nahdah Hidayaturrahmah. -. "Analisis Dampak dari Revolusi Industri 4.0 di Bidang Kesehatan". <https://osf.io/bzfu7/download/?format=pdf> diakses pada 2 Mei 2021
- Arum Sutrisni Putri.2020."Potensi Sumber Daya Alam Indonesia". Di akses pada 14 Maret 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/28/110000269/potensi-sumber-daya-alam-indonesia?page=all> diakses pada 14 Maret 2021.
- Asa. 2021. "Mantan Deputi KSP Kritik Keras Merger Kemristek-Kemdikbud". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210410110101-20-628194/mantan-deputi-ksp-kritik-keras-merger-kemristek-kemdikbud> diakses pada 3 Mei 2021.
- Billy Mulya Putra. 2021. "Angka Kemiskinan di Indonesia Alami Peningkatan, Kawasan Berikut Jadi Penyumbang Terbesar". <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-011441409/angka-kemiskinan-di-indonesia-alami-peningkatan-kawasan-berikut-jadi-penyumbang-terbesar?page=3> diakses pada 1 Mei 2021.
- BPS, 2016, "Distribusi Persentase Penduduk 2000 – 2015", <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07/843/distribusi-persentase-penduduk-menurut-provinsi-2000-2015.html>, diakses pada 14 Maret 2021.
- BPS. 2020. "Persentase Penduduk Miskin September 2019 turun menjadi 9,22 persen". <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase->

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
diakses pada 17 Agustus 2021.

Humas Setkab. 2018. "APBN 2018: Total Anggaran Pendidikan Rp444,131 Triliun, Terbanyak di Kemenag Rp52,681 Triliun". <https://setkab.go.id/apbn-2018-total-anggaran-pendidikan-rp444131-triliun-terbanyak-di-kemenag-rp52681-triliun/> diakses pada 2 Mei 2021.

KataData. 2020. "DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM". <https://katadata.co.id/umkm> diakses pada 17 Agustus 2021.

KBBI Online. 2021. "Kuat". <https://kbbi.web.id/kuat> diakses pada 18 Mei 2021.

Kemenkes. -. "Naskah Akademik RUU Rumah Sakit". http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/Naskah_Akademik_RUU_Rumah_Sakit.pdf diakses pada 12 Mei 2021.

Kemenkeu RI.2020. "Ini Upaya Pemerintah Perbaiki Kualitas SDM Indonesia". <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-upaya-pemerintah-perbaiki-kualitas-sdm-indonesia/> diakses ada 14 Maret 2021.

Malik. 2019. "Pengertian Variabel Penelitian Adalah : Contoh, Jenis, & Cara Menentukannya". <https://www.kudupinter.com/2019/09/variabel-penelitian-adalah-pengertian.html> diakses pada 12 Mei 2021.

Marthunis. 2019. "Gawat Darurat Korupsi Dana Pendidikan". <https://mediaindonesia.com/opini/220609/gawat-darurat-korupsi-dana-pondidikan> diakses pada 2 Mei 2021.

Mela Arnani. 2021. "Angka Kemiskinan Indonesia Naik, Ini Data Per Provinsi". <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all>. Diakses pada 22 Maret 2021

Muhammad Idris, 2020, "BPS: Penduduk Indonesia Diprediksi Capai 319 Juta Jiwa di 2045", <https://money.kompas.com/read/2020/02/14/181000126/bps--penduduk-indonesia-diprediksi-capai-319-juta-jiwa-di-2045?page=all>, diakses pada 14 Maret 2021.

- Muhammad Rafliyanto. 2020. "Pendidikan Karakter Indonesia Belum Berkarakter".
<https://ibtimes.id/pendidikan-karakter-indonesia-itu-belum-berkarakter>
diakses pada 15 Mei 2021.
- Nerry Kristina. 2019. "Mutu Sumber Daya Manusia melalui Revolusi Mental".
<https://writing-contest.bisnis.com/read/20191201/557/1176563/mutu-sumber-daya-manusia-melalui-revolusi-mental> diakses pada 12 Mei 2021.
- Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. 2015.
"Menkes Sampaikan Perkembangan Kepesertaan JKN kepada Menko Perekonomian".
<http://www.jkn.kemkes.go.id/detailberita.php?id=78>
diakses pada 13 Mei 2021.
- Ragimun.2021." Menguatkan Ekonomi Indonesia 2021".
<https://analisis.kontan.co.id/news/menguatkan-ekonomi-indonesia-2021#:~:text=Pertumbuhan%20ekonomi%20Indonesia%202021%20diperkirakan,juga%20memprediksi%204%2C5%25>. Diakses pada 14 Maret 2021.
- Scholastica Gerintya. 2019. "Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah". <https://tirto.id/dnvR> diakses pada 12 Mei 2021.
- Serafica Gischa. 2021. "Bentuk Kerja Sama ASEAN di Bidang Pendidikan".
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/11/120000569/bentuk-kerja-sama-asean-di-bidang-pendidikan>. Diakses pada 19 Mei 2021
- Sigerindo. 2017. "Forum Diskusi Germas Bahas Masalah Triple Burden".
<https://www.sigerindo.com/2017/04/forum-diskusi-germas-bahas-masalah.html> Diakses Pada 2 Mei 2021.
- Sinar Harapan.2020." Jangan Puas Indeks HCI Naik, Kita Masih Jauh Tertinggal".
https://www.sinarharapan.co/kesra/read/23533/jangan_puas_indeks_hci_nai_kita_masih_jauh_tertinggal diakses pada 22 Maret 2021.
- Slamet JP. 2020. "Jumlah Guru di Indonesia".
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/jumlah-guru-di-indonesia> diakses pada 15 Mei 2021.
- The Prakarsa.2020. "Universal Health Coverage: Mengukur Capaian Indonesia".
<http://theprakarsa.org/universal-health-coverage-tracking-indonesias-progress/> diakses pada 13 Mei 2021.

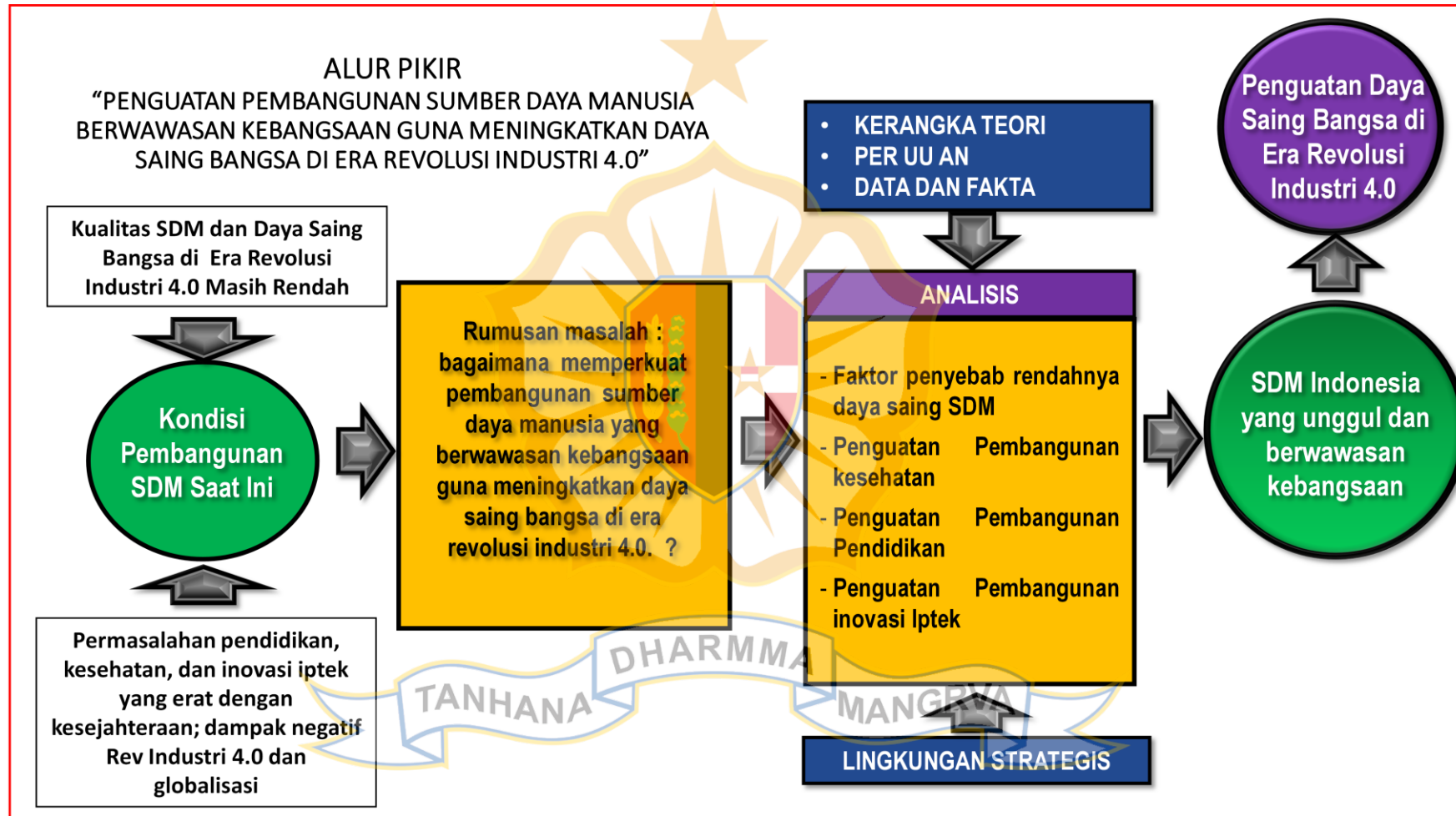
Tim CNN Indonesia. 2020. "Kesehatan Anak Indonesia Peringkat 117 di Dunia".
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200219120306-284-476063/kesehatan-anak-indonesia-peringkat-117-di-duniav> diakses pada 12 Mei 2021.

Tim Pikiran Rakyat. 2019. "Peringkat Perguruan Tinggi Indonesia Tertinggal Jauh".
<https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01316601/peringkat-perguruan-tinggi-indonesia-tertinggal-jauh> diakses pada 15 Mei 2021.

Wahyunanda Kusuma Pertiwi. 2020. "Melihat Besarnya Kesenjangan Internet antara Indonesia Barat dan Timur".
<https://tekno.kompas.com/read/2020/11/10/20020087/melihat-besarnya-kesenjangan-internet-antara-indonesia-barat-dan-timur?page=all> diakses pada 15 Mei 2021.

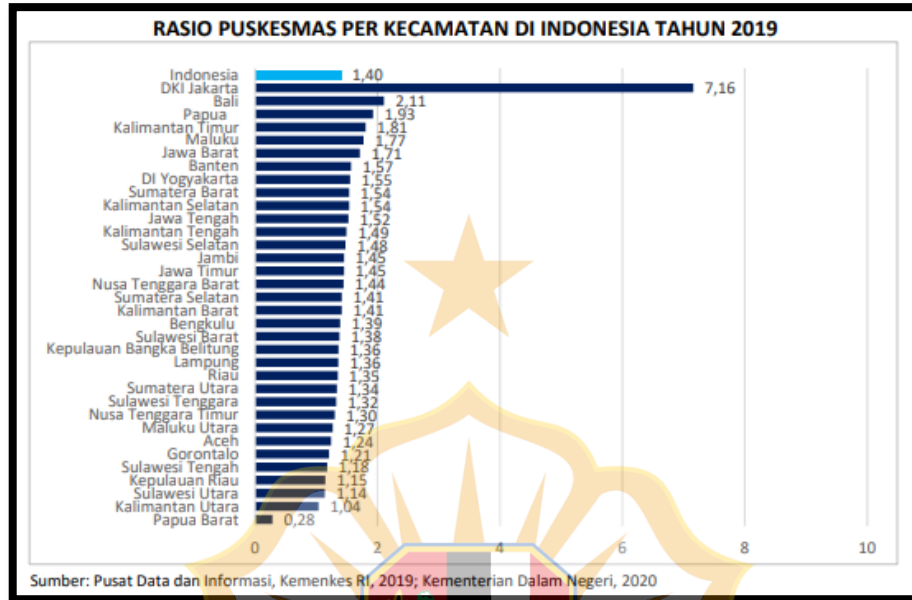
Yantina Debora. 2017. "Indeks Kesehatan Indonesia Masih Sangat Rendah".
<https://tirto.id/cBRn> diakses pada 12 Mei 2021.





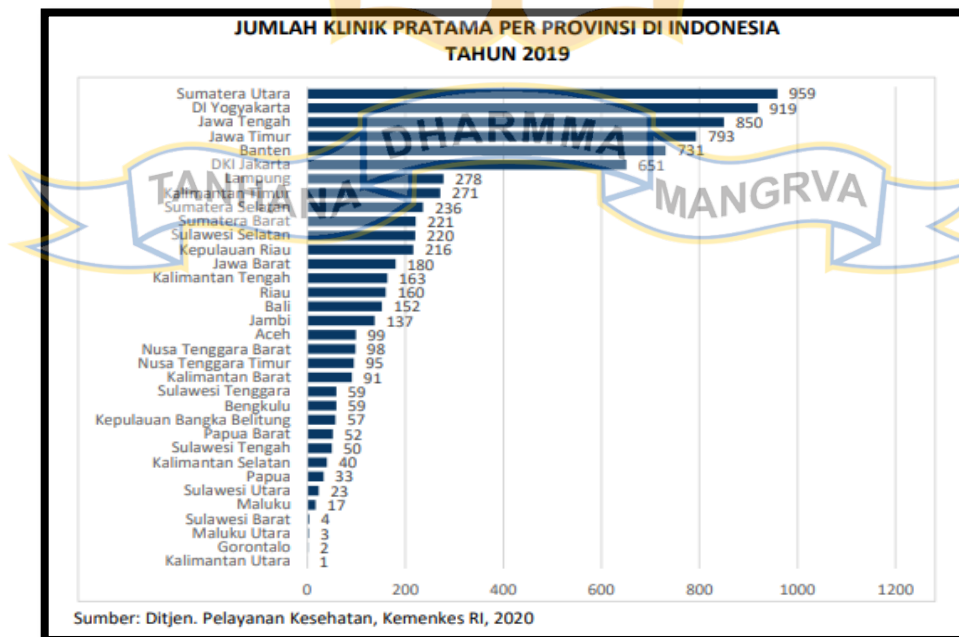
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rasio Puskesmas Per Kecamatan Di Indonesia Tahun 2019



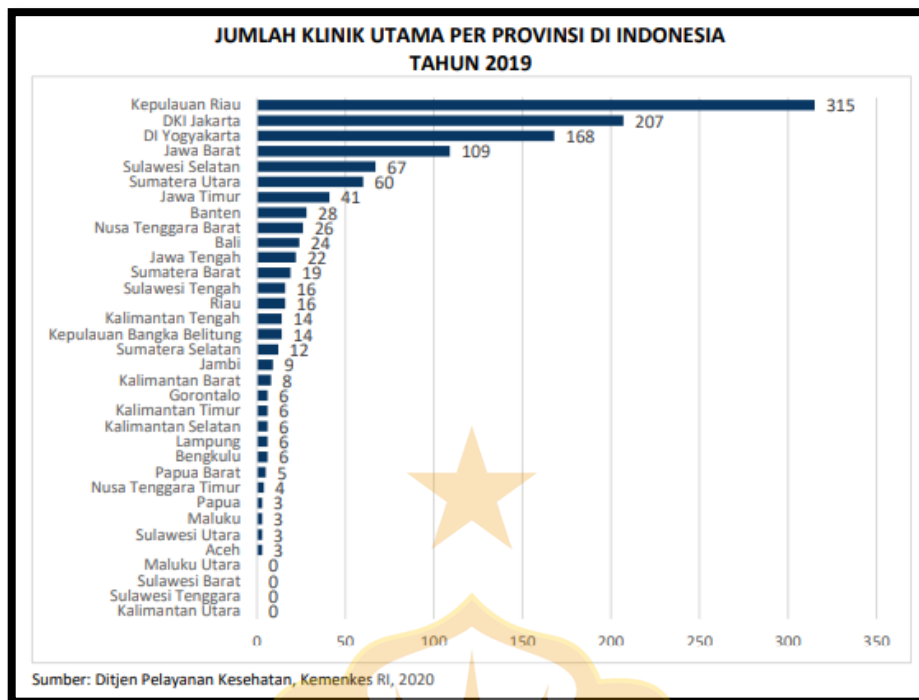
Sumber : Kemenkes RI, 2020.

Grafik 2. Jumlah Klinik Pratama Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2019



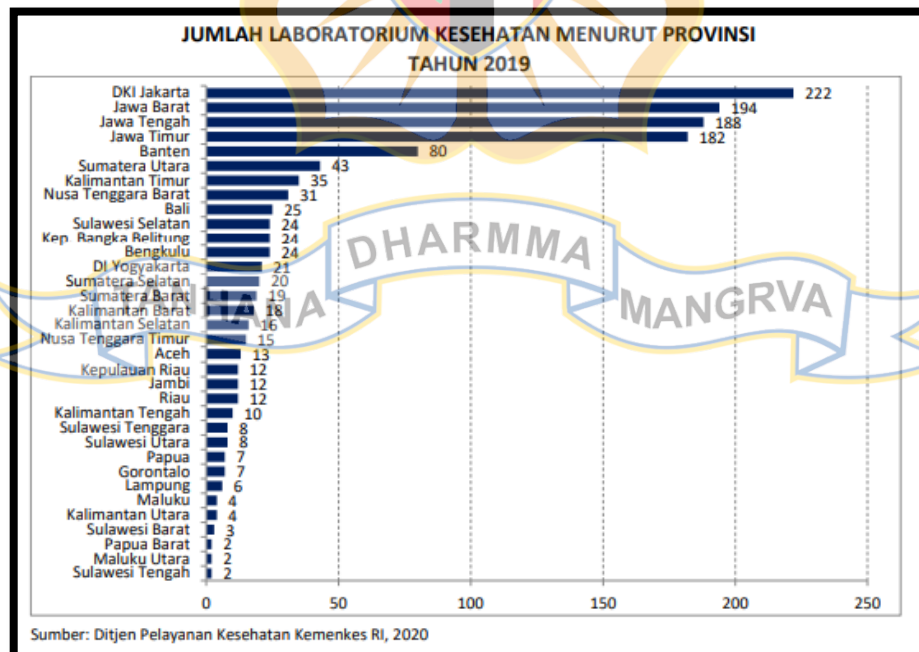
Sumber : Kemenkes RI, 2020.

Grafik 3. Jumlah Klinik Utama Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2019



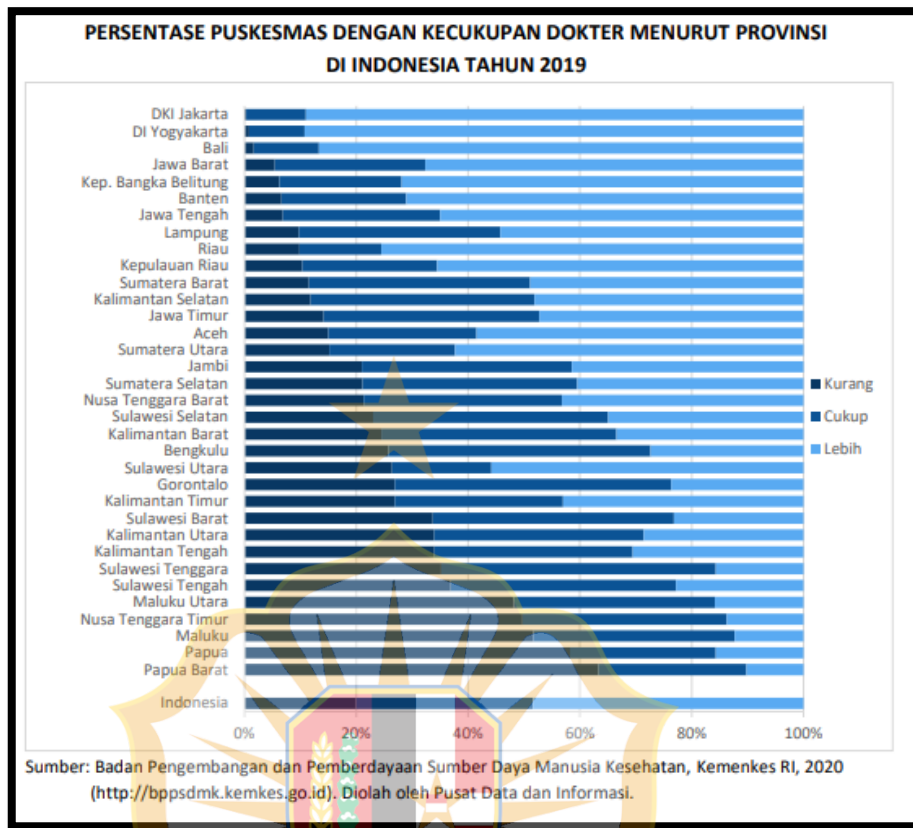
Sumber : Kemenkes RI, 2020.

Grafik 4. Jumlah Klinik Utama Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2019



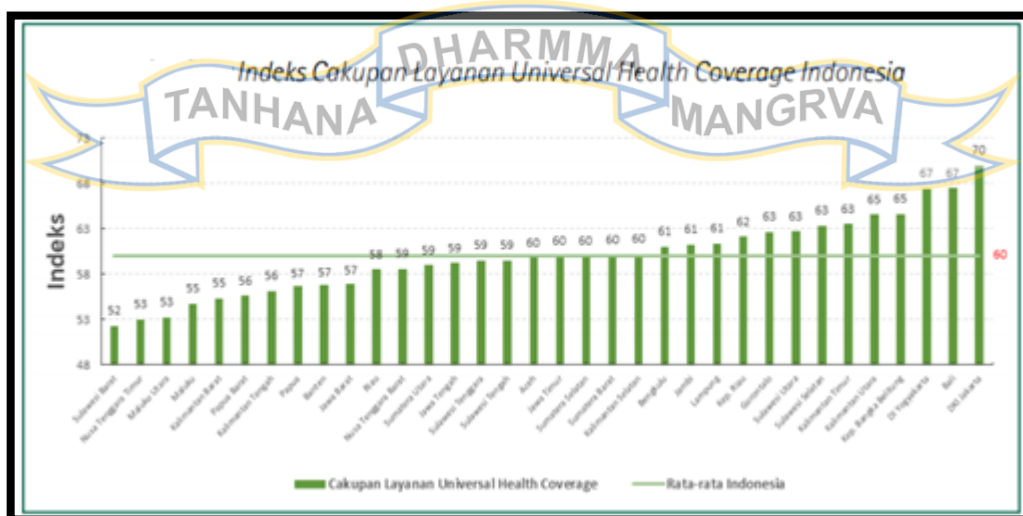
Sumber : Kemenkes RI, 2020.

Grafik 5. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2019



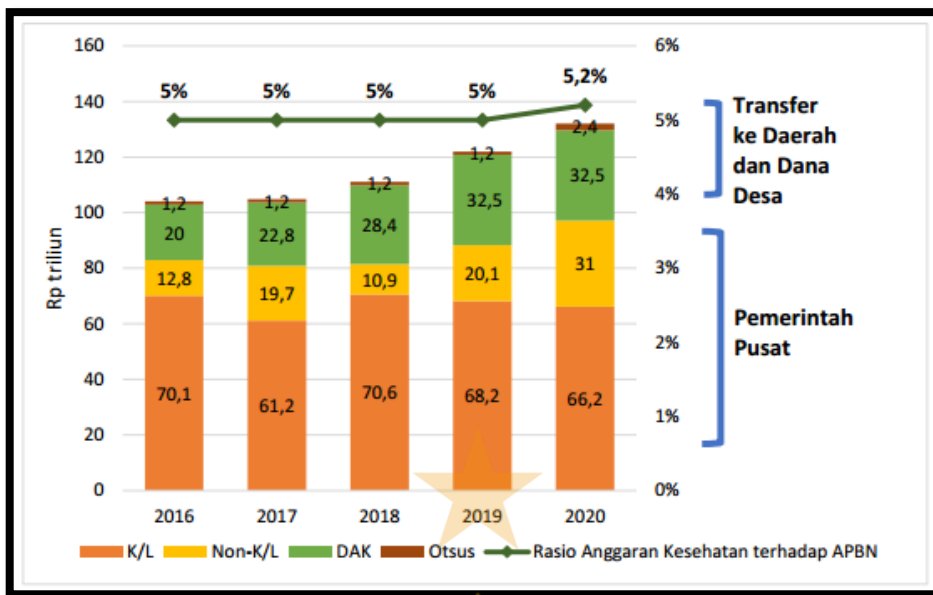
Sumber : Kemenkes RI, 2020.

Grafik 6. Indeks Cakupan Layanan UHC Indonesia tahun 2018



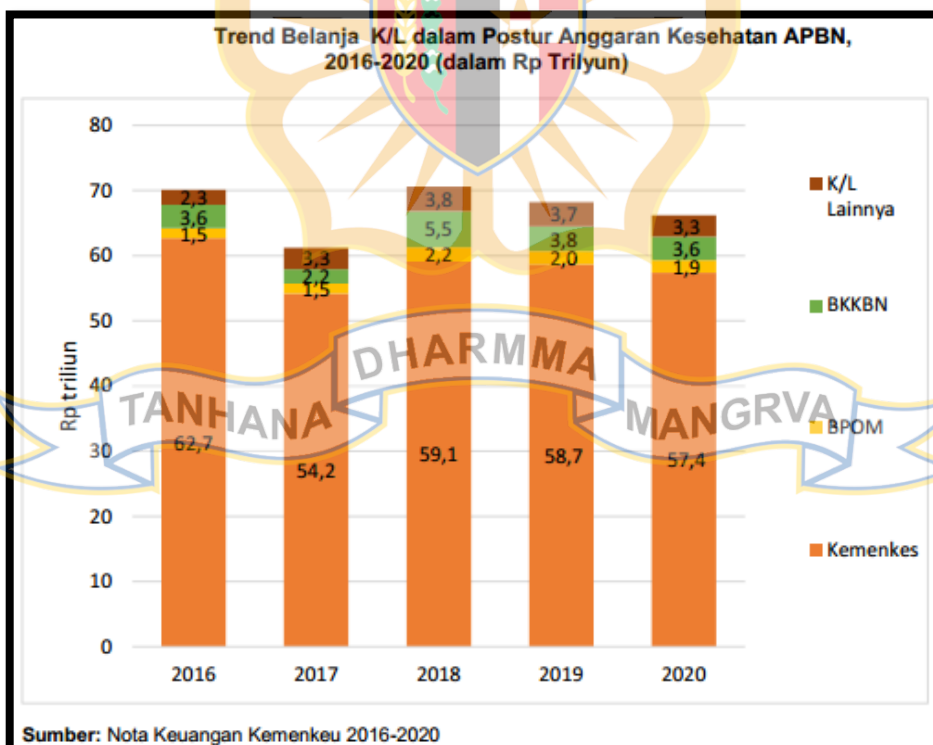
Sumber : Bappenas, 2020.

Grafik 7. Rasio Anggaran Kesehatan Terhadap APBN Tahun 2016 - 2020



Sumber : Bappenas, 2020.

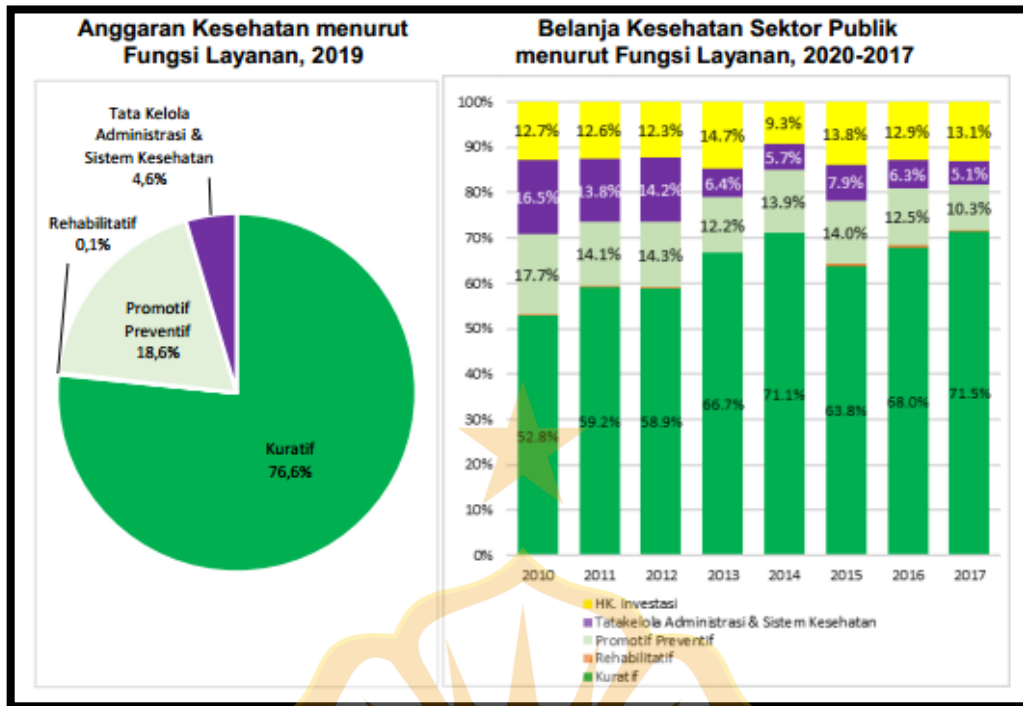
Grafik 8. Tren Belanja K/L Anggaran Kesehatan APBN Tahun 2016 - 2020



Sumber: Nota Keuangan Kemenkeu 2016-2020

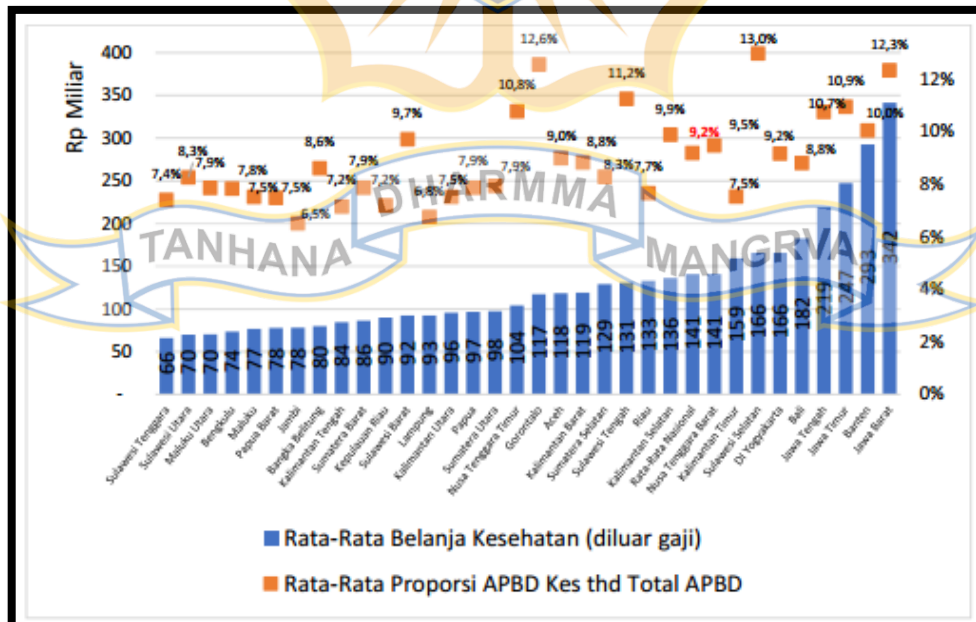
Sumber : Bappenas, 2020.

Grafik 9. Anggaran Kesehatan Menurut Fungsi Layanan Tahun 2019 dan Belanja Sektor Publik Menurut Fungsi Layanan 2010 - 2017.



Sumber : Bappenas, 2020.

Grafik 10. Rasio Anggaran Kesehatan Terhadap APBD Tahun 2017



Sumber : Bappenas, 2020.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2020 Berdasarkan Kelompok Umur

Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2020

| Karakteristik Demografi | Kelompok umur | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 7-12 | 13-15 | 16-18 | 19-24 | 19-23 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Total | 99,26 | 95,74 | 72,72 | 25,56 | 27,41 |
| Jenis Kelamin | | | | | |
| Laki-laki | 99,15 | 94,86 | 72,10 | 25,13 | 26,78 |
| Perempuan | 99,36 | 96,67 | 73,36 | 26,02 | 28,06 |
| Tipe Daerah | | | | | |
| Perkotaan | 99,60 | 96,80 | 75,70 | 30,85 | 33,21 |
| Perdesaan | 98,85 | 94,48 | 68,94 | 18,05 | 19,09 |
| Status Disabilitas | | | | | |
| Non Disabilitas | 99,31 | 95,88 | 72,94 | 25,64 | 27,49 |
| Disabilitas | 89,36 | 74,36 | 39,22 | 16,62 | 17,06 |
| Status Ekonomi Rumah Tangga | | | | | |
| Kuintil 1 | 98,87 | 92,43 | 61,54 | 15,97 | 16,79 |
| Kuintil 2 | 99,30 | 95,50 | 70,17 | 18,45 | 19,25 |
| Kuintil 3 | 99,40 | 96,20 | 74,28 | 21,44 | 22,79 |
| Kuintil 4 | 99,33 | 97,23 | 76,24 | 25,27 | 27,23 |
| Kuintil 5 | 99,54 | 98,38 | 81,71 | 41,88 | 45,71 |

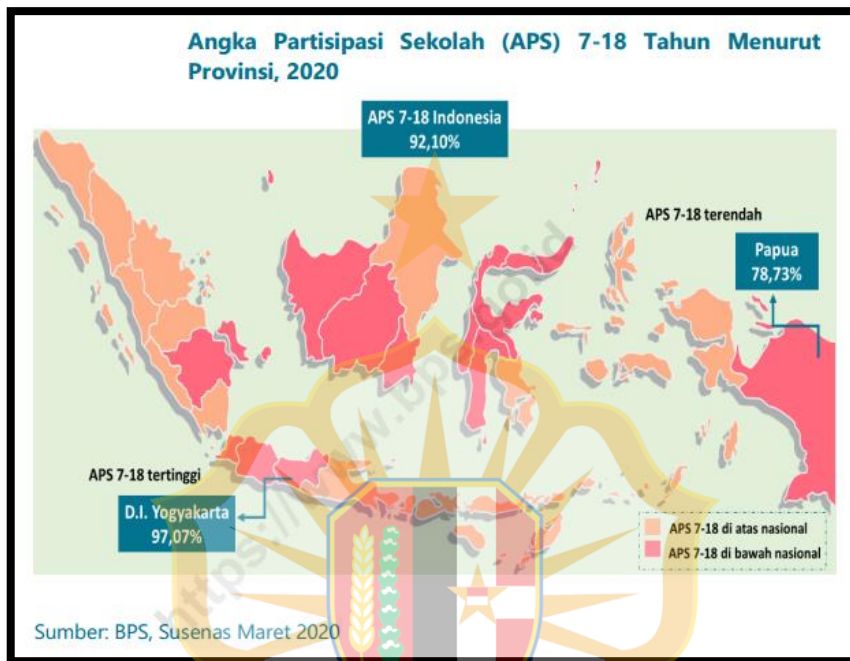
Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Sumber : BPS, 2020.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Angka Patisipasi Sekolah Usia 7018 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2020



Sumber : BPS, 2020.

Gambar 2 Peta Sebaran Guru Di Indonesia Tahun Ajaran 2019/ 2020



Sumber : <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/jumlah-guru-di-indonesia>

Gambar 3. Arah Kebijakan Pendidikan Karakter



Sumber : Kemendikbud, 2020.

Gambar 4. Ilustrasi Program Merdeka Belajar



Sumber : Kemendikbud, 2020.

LAMPIRAN 5 “ DAFTAR RIWAYAT HIDUP”

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I NAMA : ANANG PUDJIJANTO, S.I.K., M.Si.
PANGKAT/NRP : KOMBES POL. / NRP. 69060422
JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN MADYA BID. WATPERS
SSDM POLRI
TEMPAT LAHIR : KOTA MOJOKERTO
TGL LAHIR : 23-06-1969
SUKU BANGSA : JAWA
A G A M A : ISLAM



II. PENDIDIKAN :

| 1. UMUM : | 2. MILITER : | 3. PENGEMBANGAN & PELATIHAN |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| a. SD : 1983 | AKPOL 1992 | -DIKJUR LANTAS 1993 |
| b. SMP : 1986 | S1 STIK PTIK 1994 | -DIKJUR LANJUTAN PA PJR 1994 |
| c. SMA : 1989 | SESPIMPOL 2009 | -DIKBANGPERS PAMEN MNJ SDM 2014 |
| d. PASCA SARJANA (S2) : 2006 | | -DIKBANGPERS KOMISARIS FUNGPERS 2016 |

III. KECAKAPAN BAHASA :

| 1. BAHASA ASING | 2. DAERAH |
|---------------------------|------------------------|
| a. BAHASA INGGRIS : PASIF | a. BAHASA JAWA : AKTIF |

IV. T.M.T. KEPANGKATAN :

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. IPDA POL : 01-08-1992 | 4. KOMISARIS POL : 01-07-2003 |
| 2. IPTU POL : 01-10-1995 | 5. AKBP : 01-07-2008 |
| 3. AKP : 01-10-1998 | 6. KOMBES POL : 01-07-2017 |

V. RIWAYAT JABATAN :

| NO. | T.M.T | MACAM JABATAN |
|-----|-------|--|
| 1. | 1993 | PAMA POLDA SUMUT |
| 2. | 1993 | PAMAPTA POLRES TAPSEL POLDA SUMUT |
| 3. | 1994 | KAPOLSEK PENYAMBUNGAN POLRES TAPSEL |
| 4. | 1997 | KASUBBAG SELEKSI BAG DALKAR DIT PERS POLDA SUMUT |
| 5. | 1998 | KAPOLSEK MEDAN KOTA |
| 6. | 1999 | PAMA PTIK |
| 7. | 2001 | KAPUSKODAL OPS POLRES SIDRAP POLDA SULSES |

| | | |
|-----|------|---|
| 8. | 2002 | KASAT SABHARA POLRESTABES MAKASAR POLDA SULSEL |
| 9. | 2002 | WAKASAT HARA POLWILTABES MAKASAR POLDA SULSEL |
| 10. | 2003 | WAKASAT SAMAPTA POLWILTABES MAKASAR |
| 11. | 2005 | PAMEN PTIK (DLM RANGKA DIK S2) |
| 12. | 2006 | KABAG STRABANG RO RENBANG POLDA KEPRI |
| 13. | 2007 | WAKAPOLRES KARIMUN POLDA KEPRI |
| 14. | 2007 | WADIR SAMAPTA POLDA KEPRI |
| 15. | 2008 | KAPUSDALOPS RO OPS POLDA KEPRI |
| 16. | 2010 | KASUBBAG RENDIK BAG MINDIK DIR AKADEMIK PTIK |
| 17. | 2010 | KASUBBAG RENDIKJAR BAG RENDIKJARLAT BID AKADEMIK STIK PTIK LEMDIKPOL |
| 18. | 2012 | KAPOLRES SIDRAP POLDA SULSEL |
| 19. | 2013 | KABAG BINKAR ROSDM POLDA SULSEL |
| 20. | 2017 | KABAG KHIRDIN ROWATPERS SSDM POLRI |
| 21. | 2017 | KARO SDM POLDA ACEH |
| 22. | 2019 | KARO SDM POLDA SULSEL |
| 23. | 2021 | ANJAK MADYA BID. WATPES SSDM POLRI |

VI. PENUGASAN LUAR NEGERI :

-

VII. TANDA JASA YANG DIMILIKI :

1. SATYA LANCANA KESETIAAN 8 TAHUN
2. SATYA LANCANA DWIDYA SISTHA
3. SATYA LANCANA KESETIAAN 16 TAHUN
4. SATYA LANCANA KESETIAAN 24 TAHUN
5. SATYA LANCANA BHAKTI PENDIDIKAN



ANANG PUDJIJANTO S.IK, M.Si
KOMBES POL.NRP. 69060422